

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kota Tarakan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN**

Jl. P. Irian No. 12 Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah
(0551) 33910 Kota Tarakan – 77122, E-mail bappedalitbang.trk@tarakankota.go.id

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**

Kata Pengantar



Puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga Bappeda Litbang Kota Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan, merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian atas rencana kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 masih perlu ditingkatkan kembali untuk melampaui target yang ditetapkan dan agar memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan. Pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai Bappeda Litbang Kota Tarakan beserta unsur pimpinan.

Tarakan, 31 Januari 2026
BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN

Kepala,

Dr. CATUR HENDRATMO, S.T.P., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197305012005021003



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan menyajikan capaian kinerja sasaran strategis selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang. Secara rata-rata capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan pada tahun 2025 adalah sebesar 105,11% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh indikator sasaran. Pencapaian realisasi anggaran Bappeda Litbang Kota Tarakan tergolong baik, hal ini terlihat dari anggaran APBD perubahan Bappeda Litbang sebesar Rp 7.435.441.611,00 dapat terealisasi sebesar Rp 6.960.753.419,00 atau 93,62%. Seluruh sub kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2025 semuanya dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja ini akan menjadi bahan dalam perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan kinerja Bappeda Litbang yang optimal dalam menjalankan peran sentral pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kota Tarakan.

Capaian kinerja Bappeda Litbang diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Tim Penyusun LKIP
Bappeda Litbang Kota Tarakan
Tahun 2025,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....	3
E. Sumber Daya Aparatur.....	5
F. Sarana dan Prasarana Penunjang.....	5
G. Isu Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	9
B. Indikator Kinerja Utama.....	10
C. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Akuntabilitas Keuangan	63
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
D. Realisasi Anggaran	68
E. Lintas Sektor	78
F. Prestasi yang Diraih pada Tahun 2025	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi.....	84
LAMPIRAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pentingnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkesinambungan. Sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu, Laporan Kinerja hadir sebagai wujud transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas instansi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah untuk optimalisasi pelayanan publik.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Selain itu, pengukuran kinerjanya diselaraskan secara hierarkis dengan dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD Kota Tarakan 2025–2029, hingga Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2025.

Secara esensial, penyusunan LKjIP ini tidak sekadar menjadi kewajiban administratif dan media pertanggungjawaban semata. Laporan ini disusun untuk menyajikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan masyarakat luas. Melalui evaluasi kinerja ini, Bappeda Litbang Kota Tarakan berkomitmen menjadikan LKjIP sebagai instrumen perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) guna mewujudkan instansi perencanaan yang semakin akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan.
4. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Bappeda Litbang Kota Tarakan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 bermaksud untuk melaporkan capaian kinerja atas pelaksanaan dokumen perencanaan daerah kepada Wali Kota dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dokumen ini merupakan tahap akhir dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun guna mengkomunikasikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Secara spesifik, penyusunan LKjIP ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

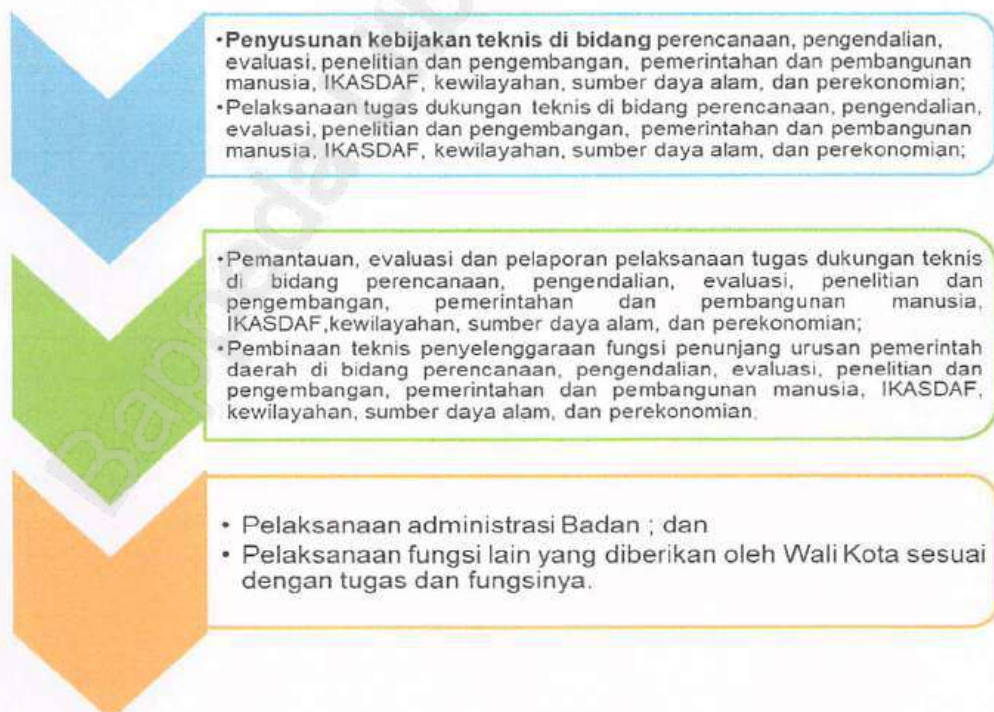
1. Sarana Pertanggungjawaban: Menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada seluruh *stakeholders* mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Instrumen Evaluasi dan Umpun Balik: Menjadi bahan evaluasi sekaligus umpan balik (*feedback*) strategis guna perbaikan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*), baik dalam penyempurnaan regulasi maupun optimalisasi alokasi sumber daya Bappeda Litbang.
3. Penguatan Tata Kelola dan Kepercayaan Publik: Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi instansi yang taat asas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program pembangunan daerah.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara kelembagaan, Bappeda Litbang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas dan Fungsi

Dalam memantapkan pelaksanaan kewenangannya—sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017—Bappeda Litbang mengemban **tugas utama** untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Guna menyelenggarakan tugas tersebut, Bappeda Litbang menjalankan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi, sebagai berikut:



Gambar 1.1
Fungsi Bappeda Litbang

b. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal serta mengacu pada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, susunan organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - Jabatan Fungsional
 - Jabatan Pelaksana;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - Jabatan Fungsional;
 - Jabatan Pelaksana;
5. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian, terdiri dari:
 - Jabatan Fungsional;
 - Jabatan Pelaksana;
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025

E. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda litbang Kota Tarakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 32 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Bappeda Litbang menurut Golongan dan Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	-	-	-	-
4	D - 1	-	-	-	-	-
5	D - 2	-	-	-	-	-
6	D - 3	-	-	3	-	3
7	D - 4 / S - 1	-	-	-	-	-
8	S - 1	-	-	16	1	17
9	S - 2	-	-	4	7	11
10	S - 3	-	-	-	1	1
Jumlah		-	-	23	9	32

Sumber : Sekretariat Bappeda Litbang Tahun 2025

F. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Aset sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan adalah berupa gedung, kendaraan roda dua , kendaraan roda empat, peralatan dan mesin serta asset tetap lainnya seperti dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.2
Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Litbang Kota Tarakan
Per 31 Desember 2025

NO	JENIS ASET SARANA DAN PRASANA	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK (UNIT)
A.	BANGUNAN GEDUNG			
1	Gedung 2 lantai	1	1	0
B.	SARANA TRANSPORTASI			

1	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	7	7	0
2	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	10	9	1
C.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA			
1	Mesin ketik	0	0	0
2	Laptop	16	15	1
3	Printer	24	24	0
4	Komputer	23	23	0
5	Proyektor LCD	1	1	0
6	Ruang Rapat	2	2	0
7	AC	21	20	1
8	TV	7	7	0
9	Kamera	1	1	0
10	Webcam	2	2	0
11	Sound system	1	1	0
12	Drone	0	0	0
13	Faximile	1	1	0
14	UPS	0	0	0
15	Meja	66	66	0
16	Kursi	113	108	5
17	Dispenser	5	5	0
18	Lemari ES	3	2	1
19	White Board	2	2	0
20	Peta	2	2	0
21	Lemari arsip	23	23	0
22	Brankas	0	0	0
23	Sofa	3	3	0
24	Penghancur kertas	4	4	0
25	Apar	3	3	0
26	Vacuum cleaner	1	1	0
27	Tempat sampah	1	1	0
28	Wireless	1	1	0

Sumber : Sekretariat Bappeda Litbang Tahun 2025

G. ISU STRATEGIS

Isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika faktor internal dan eksternal, capaian kinerja pada periode sebelumnya, serta tantangan dan ekspektasi pembangunan di masa mendatang.

Identifikasi utama dari permasalahan layanan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi bermuara pada satu isu makro, yakni: **"Belum tingginya kualitas**

perencanaan pembangunan daerah”.

Isu utama tersebut secara spesifik dijabarkan ke dalam 4 (empat) akar permasalahan strategis berikut:

1. **Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan daerah**, yang berdampak pada perlunya peningkatan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan antar hierarki pemerintahan.
2. **Masih rendahnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**, yang menuntut adanya optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan program lintas Perangkat Daerah.
3. **Masih rendahnya kualitas hasil inovasi**, yang mengindikasikan perlunya dorongan lebih kuat dalam pemanfaatan produk kelitbang dan inovasi sebagai basis pengambilan kebijakan (*evidence-based policy*).
4. **Masih rendahnya tata kelola Bappeda Litbang**, yang membutuhkan penguatan sistem akuntabilitas internal organisasi agar beroperasi secara lebih efisien dan transparan.

Keempat rumusan permasalahan di atas menjadi pijakan dasar bagi Bappeda Litbang dalam menentukan arah kebijakan, program kerja, dan sasaran prioritas pembenahan yang terintegrasi dan berkelanjutan selama tahun 2025.

Tabel 1.3
Pemetaan Isu Strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Kewenangan koordinasi lintas sektor dan perencanaan berbasis data untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Belum tingginya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis ekologis	• Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030) • Perubahan iklim global dan transisi menuju pembangunan hijau • Digitalisasi dan keterbukaan data global (open government data)	• Implementasi RPJPN/RPJMN 2025–2045 berbasis pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim • Integrasi KLHS dalam perencanaan pembangunan daerah • Penguatan Satu Data Indonesia dan sistem perencanaan berbasis kinerja	• Ketimpangan pembangunan antarwilayah dan akses pelayanan dasar • Degradasi lingkungan pesisir dan daerah aliran sungai • Kerentanan terhadap bencana iklim (banjir, abrasi, kebakaran lahan)	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Sumber : Renstra Tahun 2025-2029 Bappeda Litbang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA LITBANG

Perencanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun 2025 disusun secara hierarkis untuk mengawal dan mendukung arah kebijakan Kepala Daerah. Arah kebijakan tersebut berpedoman pada Visi Kota Tarakan, yakni: *"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan dan kelautan, serta ekonomi kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat sejahtera."*

Untuk mewujudkan visi makro tersebut, Bappeda Litbang mengambil peran sentral dalam mendukung pelaksanaan **Misi**, yaitu *"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketenteraman kota,"* dengan fokus pada pencapaian sasaran pembangunan tingkat kota berupa **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja."**

1. Tujuan Bappeda Litbang Sebagai penjabaran operasional atas amanat misi dan sasaran kota tersebut, Bappeda Litbang Kota Tarakan memformulasikan arah kebijakan organisasi ke dalam satu Tujuan Utama, yaitu: **"Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas."**

2. Sasaran Bappeda Litbang Tujuan strategis tersebut selanjutnya dikristalisasikan ke dalam tindakan-tindakan nyata yang dapat diukur keberhasilannya. Sasaran ini berfungsi sebagai alat pemacu kinerja bagi seluruh elemen organisasi sekaligus menjadi dasar pijakan dalam penilaian dan pemantauan capaian kinerja.

Guna mencapai tujuan perencanaan yang berkualitas tersebut, Bappeda Litbang menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas hasil inovasi.
4. Meningkatkan tata kelola internal Bappeda Litbang.

Secara lebih rinci, matriks penjabaran tujuan dan sasaran beserta indikator pengukurannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunannya
(Renstra 2025 – 2029)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (Indeks)	92,5	93	93,5	94	94,5
	1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1.1 Capaian komponen perencanaan kinerja (persentase)	74,5	74,6	74,7	74,8	74,9
	2.	Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.1 Capaian komponen pengukuran kinerja (persentase)	60	60,1	60,2	60,3	60,4
	3.	Meningkatnya kualitas hasil inovasi	3.1 Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan (persentase)	80	82	84	86	88
	4.	Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang	4.1 Nilai SAKIP (Nilai)	80.74 A	81.00 A	81.50 A	82.00 A	83.00 A
			4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86	88	90	92	94

Sumber : Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang merepresentasikan capaian kinerja instansi berdasarkan tugas, fungsi, dan mandat utama (*core business*) yang diemban. Bagi Bappeda Litbang Kota Tarakan, IKU tidak sekadar menjadi tolok ukur administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengevaluasi efektivitas fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah.

Melalui pengukuran IKU yang valid dan terukur, organisasi dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan memberikan kontribusi langsung dan nyata terhadap pencapaian visi-misi Kepala Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang)
Kota Tarakan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / alasan / formulasi / perhitungan	Jumlah Program	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Tujuan							
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Menggambarkan tingkat kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah berdasarkan keterpaduan antara capaian kinerja tingkat kota, capaian kinerja perangkat daerah, dan capaian program prioritas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin berkualitas proses perencanaan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah. Formulasi : 60% capaian kinerja kota + 20% capaian kinerja OPD + 20% capaian program OPD		Indeks	Bappeda Litbang Kota Tarakan	Kepala Bappeda Litbang
Sasaran							
1	SS1 : Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Capaian komponen perencanaan kinerja (persentase)	Menggambarkan tingkat keterpenuhan komponen utama perencanaan kinerja kota Tarakan sesuai pedoman SAKIP Formulasi : $\frac{\text{Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota}}{\text{Bobot Komponen}} \times 10$	2 program	Persen	Bappeda Litbang Kota Tarakan	Kepala Bappeda Litbang
2	SS2 : Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian komponen pengukuran kinerja (persentase)	Menggambarkan tingkat keterpenuhan komponen utama pengukuran kinerja kota Tarakan sesuai pedoman SAKIP Formulasi : $\frac{\text{Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota}}{\text{Bobot Komponen}} \times 100\%$	1 program	Persen	Bappeda Litbang Kota Tarakan	Kepala Bappeda Litbang

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / alasan / formulasi / perhitungan	Jumlah Program	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	SS3 : Meningkatnya kualitas hasil inovasi	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan (persentase)	Menggambarkan proporsi kebijakan atau program inovasi daerah yang telah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah atau perangkat daerah dibandingkan dengan total inovasi yang diusulkan dalam satu tahun. Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan ekosistem inovasi daerah Formulasi : $\frac{\text{Invasi daerah yang ditetapkan}}{\text{Total inovasi daerah}} \times 100\%$	1 Program	Persen	Bappeda Litbang Kota Tarakan	Kepala Bappeda Litbang
4	SS4: Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang	IKM (Indeks)	Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Bappeda Litbang Formulasi : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 program	Indeks	Bappeda Litbang Kota Tarakan	Kepala Bappeda Litbang
		Nilai SAKIP (Nilai)	Nilai yang menunjukkan akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang. Formulasi : Hasil penilaian Implementasi AKIP oleh Inspektorat		Nilai		

Sumber : Renstra Bappeda Litbang Tahun 2025-2029

C. PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2025 merupakan tahun masa transisi perencanaan bagi Pemerintah Kota Tarakan. Seiring dengan penetapan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA-P) pada bulan Oktober 2025 dan upaya penyelarasan dengan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029, Bappeda Litbang Kota Tarakan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Dokumen perubahan inilah yang secara resmi menjadi landasan utama (*baseline*) komitmen kinerja Kepala Badan sekaligus tolok ukur dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan organisasi pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan tersebut, Bappeda Litbang Kota Tarakan berkomitmen untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja, dengan rincian target sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KOTA TARAKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. CATUR HENDRATMO, S.T.P., M.M.

Jabatan : Kepala Badan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. H. KHAIRUL, M.Kes

Jabatan : Wali Kota

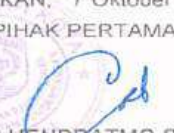
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

dr. H. KHAIRUL, M.Kes

TARAKAN, 7 Oktober 2025
PIHAK PERTAMA

Dr. CATUR HENDRATMO, S.T.P., M.M.
NIP 197305012005021003

BerAKHLAK? 

Didownload dari eSakip KOTA TARAKAN

Halaman 1 dari 3

Gambar 2.1

**Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025
(berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
TARAKAN

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian komponen perencanaan kinerja	74,5 %
		Capaian komponen pengukuran kinerja	60 %
2	Meningkatnya Kualitas hasil Inovasi	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	80 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Bappedalitbang	Nilai SAKIP	80,74 Nilai
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks

	Program	Anggaran
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	789.325.010
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	459.564.970
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	242.162.530
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.944.389.101

TOTAL DPA-P TAHUN 2025

Rp. 7.435.441.611


 Wali Kota TARAKAN

Dr. H. KHAIROL, M.Kes

TARAKAN, 7 Oktober 2025
 Kepala Badan


Dr. CATUR HENDRATMO, S.T.P., M.M.
 NIP. 197305012005021003




Didownload dari eSakip KOTA TARAKAN

Halaman 2 dari 3

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja sasaran di lingkungan Bappeda Litbang Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkan strategi melalui 3 (tiga) program prioritas, 1 (satu) program pendukung dan 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7,435.441.811,00. Adapun program kerja tersebut tertuang pada tabel seperti di bawah ini :

Tabel 2.3
Program Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025

NO	Program	Anggaran 2025		Keterangan
		APBD	APBD -P	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.033.563.869,00	5.944.389.101,00	APBD
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	927.016.600,00	789.325.010,00	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	677.606.740,00	459.564.970,00	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	267.075.700,00	242.162.530,00	APBD
	TOTAL DPA-P	7.905.262.909,00	7.435.441.611,00	APBD

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2025

Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah

serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada tahun 2025 Bappeda Litbang Kota Tarakan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 7.905.262.909,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 7.253.821.609,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 651.441.300,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2025 anggaran belanja menjadi Rp. 7.435.441.611,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 6.894.000.311,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 541.441.300,-

Tabel 2.4
Target Belanja Bappeda Litbang Kota Tarakan Perubahan APBD Tahun 2025

Uraian	Target (Rp)	Prosentase
Belanja Operasi	6.894.000.311,-	92,8%
Belanja Modal	541.441.300,-	7,2%
Jumlah	7.435.441.611,-	100 %

Untuk tahun 2025, perubahan anggaran Bappeda Litbang Kota Tarakan sebesar Rp. 7.435.441.611,- diperuntukkan untuk mendukung 4 program 13 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Adapun 4 program tersebut terdiri dari program pendukung /kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 8 kegiatan dan 44 sub kegiatan termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Adapun program utama/kegiatan utama terdiri dari 3 program yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 14 sub kegiatan, serta program penelitian dan pengembangan daerah dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan ada pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini :

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran Belanja Bappeda Litbnag Kota Tarakan Tahun 2025
per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.944.389.101,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.640.000,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.680.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.680.000,00
3	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.280.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.148.270.187,00
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.097.024.187,00
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.246.000,00
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.315.761,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.974.800,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.050.770,00
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.303.841,00
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.958.900,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.027.450,00
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.460.800,00
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00
12	Pengadaan Mebel	20.000.000,00
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.460.800,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.672.931,00
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.577.131,00
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.395.800,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.029.422,00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.106.000,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.550.000,00
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.373.422,00
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	789.325.010,00
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	618.172.000,00
22	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	491.740.700,00
23	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	32.082.300,00
24	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	65.377.300,00
25	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	28.971.700,00
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	77.209.410,00
26	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	77.209.410,00
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	93.943.600,00
27	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	93.943.600,00
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	459.564.970,00
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	238.436.770,00
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.731.070,00
29	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.250.000,00
30	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.250.000,00
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	22.070.500,00
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan	56.308.800,00

	RKPD)	
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.500.000,00
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.803.400,00
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	106.523.000,00
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	137.817.500,00
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.538.420,00
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	39.954.480,00
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.655.600,00
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	34.669.000,00
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	83.310.700,00
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.410.700,00
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	66.900.000,00
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	242.162.530,00
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	121.897.400,00
42	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	121.897.400,00
4.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	120.265.130,00
43	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	93.401.530,00
44	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	26.863.600,00

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Perubahan anggaran Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025, belanja yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Bappeda Litbang per Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan / sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Ket.
Tujuan				
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	7.435.441.611,00,-		
Sasaran				
1.1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.248.889.980,00	16,80%	Terdiri dari 6 kegiatan, 20 sub kegiatan
1.2	Meningkatnya Kualitas Hasil Inovasi	242.162.530,00	3,25%	Terdiri dari 2 kegiatan, 3 sub kegiatan
1.3	Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang	5.944.389.101,00	79,95%	Terdiri dari 6 kegiatan, 21 sub kegiatan

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan sepanjang tahun anggaran 2025. Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan realisasi aktual yang dicapai pada akhir tahun.

Mengingat seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kota Tarakan berorientasi pada peningkatan hasil (indikator positif), maka prinsip pengukurannya adalah: **semakin tinggi realisasi yang dicapai dibandingkan target, maka capaian kinerjanya dinilai semakin baik.**

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk menginterpretasikan nilai capaian kinerja yang diperoleh dari perhitungan di atas, Bappeda Litbang Kota Tarakan menggunakan standar kriteria penilaian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**. Skala nilai peringkat kinerja tersebut diklasifikasikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan metode pengukuran dan kriteria penilaian di atas, rincian akuntabilitas dan evaluasi capaian kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 dijabarkan secara mendalam pada subbab berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun anggaran 2025 memiliki arti yang sangat strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Tarakan periode 2025–2029. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun ini menjadi fondasi awal sekaligus tolok ukur krusial untuk menilai sejauh mana efektivitas langkah organisasi dalam mengawali implementasi arah kebijakan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Pengukuran dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 difokuskan pada penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan amanat Renstra tersebut, yang dioperasionalkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan secara langsung antara target sasaran strategis yang direncanakan (*performance plan*) dengan realisasi aktual yang berhasil dicapai (*performance result*) pada akhir tahun berjalan.

Secara rinci, perbandingan antara target dan capaian realisasi kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN (TAHUNAN) - PK KEPALA PD	INDIKATOR (TAHUNAN) - IKI KEPALA PD	TARGET (TAHUNAN)	REALISASI FINAL	CAPAIAN REALISASI FINAL	NORMALISASI CAPAIAN PK
-1	-2	-3	-4	-7	-8	-9
1	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian komponen perencanaan kinerja (persentase) (%)	74,5	76,10	102,15%	102,15%
		Capaian komponen pengukuran kinerja (persentase) (%)	60	59,03	98,38%	98,38%
2	Meningkatnya kualitas hasil inovasi	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan (%)	80%	96%	120%	110,00%
3	Meningkatnya tata kelola Bappedalitbang	Nilai SAKIP (Nilai)	80.74/A	86,55	107,20%	107,20%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86	92,72	107,81%	107,81%
Total Capaian PK						525,54%
Rata-rata Capaian PK						105,11%

Sumber : Bappeda Litbang, tahun 2026

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, pengukuran capaian kinerja Bappeda Litbang difokuskan pada tingkat keberhasilan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara agregat, performa organisasi pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan rata-rata capaian mencapai **105,11%** (Predikat Istimewa), di mana Bappeda Litbang berhasil merealisasikan bahkan melampaui mayoritas target yang telah disepakati.

Dari total 5 indikator kinerja yang diukur, sebanyak 4 indikator (80%) berhasil melampaui target dengan capaian di atas 100%, sementara 1 indikator (20%) berada pada level capaian 98,38% yang secara kriteria evaluasi tetap masuk dalam kategori kinerja "Sangat Tinggi". Potret keberhasilan tata kelola makro Bappeda Litbang Kota Tarakan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga pilar capaian utama:

1. Pilar Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Fungsi Bappeda Litbang sebagai motor penggerak pembangunan daerah berjalan sangat efektif. Hal ini dibuktikan dengan Capaian Komponen Perencanaan Kinerja yang berhasil menembus angka 76,10 (dari target 74,50), mencatatkan persentase capaian 102,15%. Meskipun pada aspek Pengendalian dan Evaluasi capaiannya berada di angka 98,38% (realisasi 59,03 dari target 60,00), keterpenuhan komponen evaluasi pembangunan secara substansial tetap terkawal dengan sangat baik sesuai pedoman SAKIP berkat sinergi pengendalian lintas Perangkat Daerah.

2. Pilar Akselerasi Inovasi Daerah Keberhasilan paling menonjol pada tahun 2025 ditunjukkan oleh lompatan kinerja pada aspek kelitbangan dan inovasi. Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan berhasil menyentuh angka 93,62% (melampaui target 80%). Dengan tingkat capaian menembus 117,03% (dinormalisasi menjadi 110,00%), hal ini membuktikan bahwa proporsi usulan inovasi daerah tidak hanya sekadar dokumen riset, melainkan berhasil dieksekusi menjadi kebijakan riil melalui ketetapan Kepala Daerah maupun Perangkat Daerah pengusul.

3. Pilar Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Keberhasilan eksternal dalam mengawal pembangunan diimbangi dengan soliditas tata kelola internal organisasi. Komitmen terhadap tata kelola yang baik ini terwujud dalam pencapaian Nilai SAKIP internal Bappeda Litbang yang melonjak ke angka 86,55 (capaian 107,20% dari target 80,74), mengamankan predikat A. Kualitas proses bisnis internal ini berbanding lurus dengan kepuasan publik, di mana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Bappeda Litbang tercatat di angka 92,72, melampaui target yang ditetapkan sebesar 86.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi pencapaian, faktor pendorong keberhasilan, serta evaluasi atas kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan, berikut adalah telaah dan analisis kinerja yang dijabarkan secara rinci untuk masing-masing Sasaran Strategis:

a) **SASARAN 1 (SS1) :**

Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, pada Tahun 2025 terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu:

- ***Capaian komponen perencanaan kinerja Indeks Kualitas Perencanaan***

kedua IKU tersebut pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Review menjadi 2 (dua) IKU yaitu, ***Indeks Sinergitas*** dan ***Indeks Kualitas Perencanaan***. Mengacu pada dokumen perencanaan tahun 2025 dan tahun 2024 keduanya memiliki indikator sasaran yang berbeda, sehingga capaian tahun lalu tidak dapat dilakukan perbandingan. Sehingga PK IKU SASARAN1 pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan PK IKU pada Tahun 2025.

b) **SASARAN 2 (SS2)**

Selanjutnya perbandingan capaian kinerja indikator **Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**, dengan indikator ***Capaian komponen pengukuran kinerja***. Untuk perbandingan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, Penyesuaian IKU atas review Menpan RB Tidak dapat di bandingkan/ dianalisis dengan tahun 2025.

c) **SASARAN 3 (SS3)**

Selanjutnya perbandingan capaian kinerja indikator **Meningkatnya Kualitas hasil Inovasi**, dengan indikator ***Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan***. Pada Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan (kelitbangna) yang sudah direncanakan dalam roadmap kelitbangan dengan tujuan memastikan topik kelitbangan yang diusulkan benar-benar terlaksana dan berampak pada kebijakan daerah sebagai laporan hasil penelitian, dokumen kajian atau seminar hasil.

Sedangkan pada indikator Persentase Kebijakan Inovasi daerah yang ditetapkan lebih mengukur seberapa banyak produk hukum atau peraturan inovasi yang telah di sahkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu untuk mendorong percepatan legalitas inovasi sebagai pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dalam dokumen peraturan kepala daerah atau kepala OPD terkait inovasi.

Untuk perbandingan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, Penyesuaian IKU atas review Menpan RB Tidak dapat di bandingkan/ dianalisis dengan tahun 2025.

Penelitian dan pengembangan (Litbang) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemology maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peran litbang dalam tata Kelola pemerintahan adalah mengidentifikasi setiap permasalahan baik yang bersifat aktual maupun prediktif yang berkembang di daerah. Hasil penelitian dan pengembangan diharapkan dapat digunakan dalam penyusunan dokumen yang dapat jadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah untuk Pembangunan daerah. Dengan kata lain, perubahan sasaran 2 *Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan* tahun 2024 pada sasaran 2 tahun 2025 *Meningkatnya Kualitas hasil Inovasi* terjadi agar kelitbangan tidak hanya berhenti pada implementasi rencana tetapi berujung pada inovasi yang ter implementasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Pergeseran focus dari sekedar memenuhi target administrative (output) menjadi orientasi pada hasil nyata (outcome) yang berdampak bagi pembangunan daerah. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pergeseran Berbasis Kinerja

- Indikator lama *Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan* seringkali hanya mengukur kepatuhan administrative atau jumlah dokumen/kegiatan yang dilaksanakan, indikator baru *Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan* menekankan pada

pemanfaatan hasil; riset/inovasi (rekomendasi/produk) yang benar-benar digunakan untuk permasalahan daerah.

2. Amanat Penyelenggaraan Pemerintahan

- Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan meningkatkan daya saing daerah.

3. Peningkatan Dampak Kebijakan

- Hasil Kelitbangan diharap menghasilkan inovasi yang bernilai tambah tinggi tidak hanya sekedar dokumen teoritis.

4. Evaluasi Indeks Inovasi Daerah

- Adanya penilaian indeks inovasi daerah (ID) oleh Kemendagri yang mengukur kematangan inovasi (diatas 90) mendorong pemerintah daerah untuk focus pada kualitas dan keterterapan inovasi.

Selanjutnya rencana dan realisasi capaian sasaran **"Meningkatnya Kualitas hasil Inovasi "** ditampilkan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
SASARAN 2 (SS2) "Meningkatnya Kualitas hasil Inovasi"

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun						Target Renstra 2025	Capaian 2024 terhadap target 2025
			2022		2023		2024			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	%					100	100	80	125

Keterangan :

- : Kinerja 2024 s/d Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan
- : Kinerja Tahun 2022 s.d Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan Kinerja Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja untuk indikator Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan, target sasaran Renstra pada tahun 2024 adalah 100%, jika dibandingkan dengan realisasi renstra pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, maka tingkat ketercapaian terhadap target renstra yaitu 100% dengan predikat **Sangat Tinggi** (tingkat kemajuan tercapai)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan 80%, realisasi sebesar 93,62%, tercapai 117,03% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Apa bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2025 melampaui target dan capaian tahun 2024.

Target capaian tahun 2025 (akhir Renstra) sebesar 88% Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2025.

d) SASARAN 4 (SS3)

“Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang”

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya (2024) diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2025 dan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025
SASARAN 3 (SS3) “Meningkatnya Tata Kelola Bappedalitbang”

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2022		2023		2024			2025		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Bappedalitbang	Nilai SAKIP	75 (BB)	77,50 (BB)	75 (BB)	78,96 (BB)	78 (BB)	80,74 (A)	110,37	80,74 (A))	86,55 (A)	107,20
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	81,04	80	82,77	83,11	85,89	103,33	86	92,75	107,85

Sumber: Bappeda Litbang Kota Tarakan, diolah

Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Litbang, apabila disandingkan data awal dan data realisasi dan capaian dari tahun ke tahun, mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran *Meningkatnya Tata Kelola Bappedalitbang* pada tahun 2025 dengan indikator Nilai SAKIP capaian kinerja sebesar 86,55 (A), jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 78 (BB) maka tingkat ketercapaian terhadap target renstra sebesar 107,20% dengan tingkat kemajuan tercapai, melebihi target dengan kategori sangat baik.

Hasil Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Litbang, apabila disandingkan data awal dan data realisasi dan capaian dari tahun ke tahun, mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan.

Hal ini disebabkan komitmen Bappeda Litbang dalam melakukan perbaikan kualitas layanan, transformasi digital dan inovasi dalam pelayanan. Tindak lanjut hasil survey IKM melalui peningkatan respon partisipan atas 3 layanan terendah di tahun sebelumnya (2024) hal ini disebabkan oleh realisasi rencan aksi yang ditindaklanjuti oleh UPP Bappeda Litbang dan di respon baik oleh partisipan.

1. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Akhir Renstra 2030	Tingkat Kemajuan (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SS1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1.1 Capaian komponen perencanaan kinerja	Persen	72,83	75	102,97	Sangat Tinggi
2.	SS2. Meningkatnya kinerja pengendalian	2.1 Capaian komponen pengukuran kinerja	Persen	58,2	60,5	103,95	Sangat Tinggi

	evaluasi pembangunan daerah							
3	SS3. Meningkatnya kualitas hasil inovasi	3.1	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	Persen	75	90	120	Sangat Tinggi
4.	SS4. Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang	4.1	Nilai SAKIP (Nilai)	Nilai	78,96 (BB)	84.00 A	106,4	Sangat Tinggi
		4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,89	96	111,8	Sangat Tinggi

Sumber: Bappeda Litbang Kota Tarakan, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Perbandingan Baseline kinerja Sasaran Strategis tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun akhir 2030 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **SASARAN 1 (SS1),**

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah untuk indikator "Capaian komponen perencanaan kinerja", target sebesar 72,83 % dapat tercapai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 102,97% (persentase tingkat kemajuan "sangat tinggi"). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2030.

- **SASARAN 2 (SS2),**

Adapun capaian **Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah** kinerja indikator Capaian komponen pengukuran kinerja, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 60,5%, juga melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi tingkat kemajuan 103,95% (kategori sangat tinggi).

- **SASARAN 3 (SS3),**

Meningkatnya kualitas hasil inovasi, Perbandingan Capaian Kinerja baseline Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2030, indikator Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan, dengan tingkat kemajuan 120% kategori sangat tinggi.

- **SASARAN 4 (SS4),**

Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang, dengan IKU Nilai SAKIP dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM), Perbandingan capaian kinerja baseline tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2030, tingkat kemajuan sebesar 106,4% sudah diatas target yang ditetapkan dengan kategori Sangat

Tinggi. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian kinerja melampaui baseline tahun 2024 yang ditentukan yaitu 85,89% dengan tingkat kemajuan 111,8% kategori sangat tinggi dengan perbandingan target renstra tahun 2030.

Berdasarkan tabel diatas, seluruh target capaian akhir rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kota Tarakan sudah tercapai pada tahun 2025.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas

Capaian kinerja Bappeda Litbang apabila dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan untuk capaiannya karena tidak ada standar nasional untuk indeks perencanaan dan juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara karena masing- masing Bappeda Litbang baik di Kota/Kabupaten maupun Propinsi dalam menentukan rumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda.

Sebagai alternatif perbandingannya adalah membandingkan sasaran daerah (Pemerintah Kota) yang merupakan salah satu komponen dari 1 (satu) komponen untuk menghitung capaian kinerja Bappeda Litbang. Indikator yang bisa diperbandingkan adalah :

◆ Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi, sebagaimana pada Sasaran 4 *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif* diukur dengan indikator (2) *Nilai SAKIP* pada tahun 2025 dengan target 70,05 (BB) dan realisasi 66,48 (B) yang ditetapkan baik target RPD dan target RKPD. Artinya sasaran daerah ke empat tercapai 94,90% pada 2025 dengan predikat “baik”. Kemudian perbandingan realisasi indikator sasaran terhadap realisasi pada tingkat provinsi dan pusat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Benchmark Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025

INDIKATOR SASARAN	Level Pemerintah	REALISASI		
		2023	2024	2025
Nilai SAKIP	Bappeda Litbang	78,96 (BB)	80,74 (A)	86,55 (A)
	Kota Tarakan	64,53 (B)	64,89 (B)	66,48 (B)
	Provinsi KALTARA	73,41 (BB)	71,05 (BB)	71,42 (BB)

Sumber: KemenPAN/RB, Bappeda (diolah)

Sesuai dengan tabel di atas bahwa capaian nilai SAKIP Kota Tarakan pada 2025 masih berada di bawah capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah mendapatkan predikat BB dengan nilai 71,42 sedangkan Pemerintah Kota Tarakan dengan predikat B nilai 66,48.

Untuk progress dari implementasi SAKIP pada Bappeda Litbang sangat diperlukan dan krusial hal ini dikarenakan :

- Bappeda Litbang sebagai Lembaga menyusun Perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD)
- Tolak Ukur efisiensi Anggaran
- Evaluasi Kinerja Pembangunan
- Tindak Lanjut LHE
- Dampak pada predikat Pemerintah Daerah

Grafik 3.1
Progres Implementasi SAKIP Bappeda Litbang Tahun 2023-2025



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi/ Tindakan lanjut yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SS1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1.1 Capaian komponen perencanaan kinerja	74.5 %	76.,10 %	102,15 %	- Pohon kinerja level Pemerintah Daerah telah disusun dengan cukup baik dan berhasil mengidentifikasi Critical Success Factor (CSF) yang relevan dan dibutuhkan untuk mencapai ultimate outcome. Namun, sebagian CSF belum diuraikan kepada kinerja level intermediate outcome sehingga pohon kinerja tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan acuan kinerja krusial yang perlu dikawal pada level Perangkat Daerah; - Masih ditemukan sebagian kecil indikator kinerja pada dokumen perencanaan (Renstra/PK) Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria relevan dan cukup untuk mengukur kinerja yang dikawal - Masih ditemukan target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 atau Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tahun 2025 yang ditetapkan lebih rendah atau sama dengan realisasi tahun sebelumnya - Secara umum kualitas rumusan immediate outcome pada pohon kinerja beberapa Perangkat Daerah belum baik, ditemukan beberapa immediate outcome yang tidak relevan, redundant atau tidak cukup untuk mengungkit kinerja di atasnya - Rumusan cascading kinerja belum tepat dan Crosscutting kinerja yang telah diidentifikasi oleh Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan penetapan indikator dan target kinerja - Aktivitas dalam rencana aksi masih didominasi oleh daftar kegiatan/aktivitas rutin	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) agar menguraikan seluruh CSF kepada kinerja level intermediate outcome yang relevan sehingga tergambar kumpulan kinerja krusial yang harus/wajib dikawal oleh Perangkat Daerah - Melakukan reviu terhadap indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja yang dikawal pada level Perangkat Daerah, kemudian melakukan perbaikan agar setiap indikator yang digunakan telah memenuhi kriteria spesifik, relevan dan cukup - Setiap Perangkat Daerah agar memastikan target kinerja telah ditetapkan berdasarkan analisis capaian tahun-tahun sebelumnya, tren kinerja, serta kondisi factual - Menyempurnakan kualitas pohon kinerja Perangkat Daerah dengan memastikan hubungan logis antar jenjang kinerja terpenuhi dengan baik khususnya pada level immediate outcome dan output - Menetapkan indikator sekaligus target crosscutting kinerja sehingga dapat tergambar dengan jelas berapa kontribusi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja utama Perangkat Daerah; dan - meninjau kembali aktivitas yang telah disusun dan menyesuaikannya agar mencerminkan langkah-langkah strategis yang mendukung pencapaian outcome. Selanjutnya, rencana aksi yang disusun agar dilengkapi dengan penetapan indikator yang bersifat substansi (bukan menghitung dokumen/laporan) dan target periodik.

2.	SS2. Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.1	Capaian komponen pengukuran kinerja	60 %	59,03 %	98,38 %	- Formula perhitungan indikator yang dikawal oleh Pejabat eselon III dan jabatan dibawahnya belum dirumuskan dengan jelas, kondisi ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam pengukuran kinerja dan berpotensi menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap cara perhitungan maupun makna capaian - Pengukuran kinerja periodic secara berjenjang belum dilaksanakan secara konsisten dan disiplin khususnya pada level Perangkat Daerah, kondisi ini terlihat dari masih banyaknya Perangkat Daerah yang tidak melaporkan progress capaian kinerja triwulan an pada aplikasi manajemen kinerja Pemerintah Kota Tarakan	Sesuai rekomendasi MenPAN : - Setiap level jabatan dilingkungan Perangkat Daerah diharapkan agar menetapkan formula/rumus perhitungan indikator kinerja yang dikawal untuk meminimalisir perbedaan interpretasi perhitungan, kekeliruan dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja sehingga besaran realisasi target kinerja yang diperoleh nantinya benar-benar dapat menggambarkan pencapaian substansi dari kinerja yang dikawal, - Seluruh Perangkat Daerah agar meningkatkan disiplin dan komitmen pelaksanaan pengukuran kinerja periodic mulai dari level Kepala Dinas/Badan, Kepala Bidang hingga individual / staf . Pengukuran kinerja tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kendala hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sehingga dapat dirumuskan solusi atau strategi perbaikan ke depan.
3	SS3. Meningkatnya kualitas hasil inovasi	3.1	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	80 %	93,62	117,03	Komitmen Kepala Badan dengan penerapan kebijakan inovasi berkualitas, terdokumentasi (SOP/SK) dan berdampak langsung pada pelayanan yang berkelanjutan.	Bappeda Litbang terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada PKO Tahun 2025 dengan sasaran meningkatnya kualitas hasil inovasi target 80,00%, capaian 93.62%.
4.	SS4. Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang	4.1	Nilai SAKIP	80,74 (A)	86,55 (A)	107,20 %	a. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan b. Nilai AKIP Bappeda Litbang terus mengalami peningkatan signifikan, terakhir LHE SAKIP Tahun 2024 dari target 78 (BB) dengan realisasi 80,74 (A) dengan tingkat capaian sampai dengan tahun 2025 sudah sebesar 107,20 % sudah berada di atas target yang ditetapkan c. koordinasi yang intens	Bappeda Litbang dalam upaya perbaikan dan peningkatan nilai SAKIP melalui aplikasi eSakipPRO (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan dimana aplikasi diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi kinerja. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pendampingan pelatihan aplikasi e-SakipPRO secara daring dan pelatihan penguatan aplikasi e-SakipPRO untuk aparat pemerintah Kota Tarakan. Penerapan aplikasi ini umumnya bersinergi dengan kebijakan tata Kelola pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

		4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	92,75	107,81 %	d. Memperkuat koordinasi dan melakukan monitoring secara berkala	Pencapaian nilai tersebut terus ditingkatkan melalui peningkatan respon dari partisipan atas 3 layanan dasar terendah tahun sebelumnya (2024) dengan realisasi Rencana Aksi yang ditindak lanjuti oleh UPP Bappeda Litbang. Pada Tahun 2025 Bappeda Litbang telah memperoleh Juara II dalam tata kelola kearsipan dan terus ditingkatkan saat ini telah menerapkan SRIKANDI dalam menunjang Pelayanan Bappeda Litbang,
--	--	-----	----------------------------------	----	-------	----------	--	--

Pada tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan telah berhasil mencapai target kinerja yang ditentukan pada rencana kerja 2025. Keberhasilan ini tercapai karena adanya program/kegiatan yang mendukung tercapainya fungsi Bappeda Litbang dalam menjalankan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

1. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Litbang pada tahun 2025 dengan melalui 6 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya strategis yang sejalan dengan kaidah perencanaan diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana berikut;

2. Sasaran (SS.1) : *Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan Daerah*

- a. Peningkatan Kualitas Data dan Analisis dengan memastikan perencanaan didasarkan pada data yang valid, akurat dan mutakhir untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran.
- b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran yaitu memperkuta konsistensi anatar dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dengan dokumen penganggaran (SPBD) agar program prioritas dapat terlaksana.
- c. Implementasi System Berbasis Digital (E-Planning/SIPD) dengan menggunakan System Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara optimal untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi dan transparansi anatar SKPD.
- d. Peningkatan Kualitas SDM dan Kapasitas Bappeda Litbang yaitu dengan peningkatan kompetensi aparatur terkait monitoring, evaluasi dan penyusunan indikator kinerja yang SMART.
- e. Perbaikan metode perencanaan (Proses Musrenbang) yaitu pasrtisipasi aktif dan orientasi hasil (Bottom-up Planning)
- f. Penerapan inovasi daerah dengan mendorong setiap perangkat daerah unrtuk menciptakan inovasi guna

pencapaian kinerja yang sesuai.

- g. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) secara Berkala dengan melakukan evaluasi secara insentif untuk mengetahui faktor penyebab ketidaktercapaian target dan mengambil tindakan perbaikan.

2. Bukti dukung Eviden dan Analisis Pencapaian Sasaran (IKU) Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2025 melalui dukungan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Fungsi di bidang perencanaan Pembangunan harus memastikan dan mengawal dalam penyusunan RKPD, program yang ada pada perangkat Daerah sesuai dengan yang terdapat dalam RPJMD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengawal dan mendampingi melalui monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah yang mendukung sasaran daerah. Penguatan perencanaan telah dilakukan dalam proses penyusunan RPJMD yang kemudian diturunkan pada Renstra perangkat daerah sampai pada cascading.

Pada indikator Sasaran 1 (SS.1)) Capaian Komponen Perencanaan Kinerja, target capaian tahun 2025 sebesar 74,5%, dengan capaian 102,15 % dan indikator Sasaran (SS.2) Capaian Komponen Pengukuran Kinerja, target capaian tahun 2025 sebesar 60 % maka realisasi 59,03 % dengan capaian 98,38 % tahun 2025 ini belum sesuai dengan target .

Berkaitan pada aspek pengukuran, IKU sudah ditetapkan baik IKU Kota maupun IKU perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan juga Perjanjian Kerja (PK) Kota dan Kepala perangkat daerah. Belum optimalnya *area pengukuran* disebabkan :

- Belum adanya system informasi tentang pengukuran, Kota Tarakan baru menerapkan system informasi pengukuran pada pertengahan tahun 2026 sehingga hasilnya belum optimal.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Capaian Komponen Perencanaan Kinerja dan Capaian Komponen Pengukuran Kinerja yang akan

dilaksanakan sebagai berikut

- Perencanaan yang matang penetapan tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan faktor risiko yang ada;
- Penyelarasan Strategis
- Renaksi dan Komitmen
- Indikator yang relevan
- Pengukuran Berkala
- Pemanfaatan Teknologi Informas
- Kerlibatan Pimpinan
- Evaluasi dan tindaklanjut.

Untuk menjalankan fungsi perencanaan pembangunan Bappeda Litbang bekerjasama dan berkontribusi secara erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kerjasama ini krusial untuk menyelaraskan dokumen teknokratis perencanaan pembangunan dengan aspirasi politik rakyat yang diwakili oleh DPRD Kota Tarakan, sebagaimana kegiatan terlihat dibawah ini :



Gambar 3.1
Rapat Pembahasan Pansus RPJMD Tahun 2025-2029
bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Tarakan

Bentuk Kerjasama dan kontribusi Bappeda Litbang Bersama DPRD Kota Tarakan dalam perencanaan pembangunan diantaranya :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)
- Musrenbang dan Pokir DPRD

- Pembahasan Anggaran (APBD)
- Evaluasi dan Monitoring
- Kunjungan Kerja dan Study Banding

Formulasi dari indikator kinerja utama Capaian Komponen Perencanaan Kinerja dan Capaian Komponen Pengukuran Kinerja Indeks dilakukan dengan menyelaraskan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan indikator IKU Capaian Komponen Perencanaan Kinerja dan Capaian Komponen Pengukuran Kinerja.



Gambar 3.2
Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029
Bertempat di Ruang Serbaguna Tahun 2025



Gambar 3.3
Musrenbang RKPDP Kota Tarakan Tahun 2026
Bertempat di Ruang Serbaguna Tahun 2025



Gambar 3.4
Musrenbang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029
Bertempat di Gedung Gadis Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 3.5
Bimbingan Teknis Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025
bertempat di Ruang Imbaya

Rangkaian peran Bappeda Litbang dalam peningkatan capaian komponen perencanaan kinerja maupun capaian komponen pengukuran kinerja juga melalui pendekatan konvergensi dan integrasi perencanaan (8 aksi konvergensi stunting) yang sistematis, rangkaian tersebut meliputi :

1. Analisis Situasi
2. Rencana Kegiatan
3. Rembug Stunting
4. Peraturan Wali Kota
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
6. Sistem Majemen Data
7. Pengukuran dan Publikasi Data
8. Review Kinerja

Dengan rangkaian ini Bappeda Litbang memastikan bahwa seluruh komponen pengukuran kinerja baik intervensi spesifik maupun sensitive berjalan secara konvergen, terukur dan berdampak.



Gambar 3.6
Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan
(Rancangan RPJMD 2025-2029) Tahun 2025

Koordinatif, fasilitatif dan sinkronisasi adalah hubungan Bappeda Litbang dengan OPD, dimana Bappeda Litbang menetapkan arah kebijakan, Menyusun dokumen perencanaan (Renja/RPJMD) dan melakukan evaluasi kinerja sementara OPD Menyusun dokumen perencanaan teknis dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan pedoman tersebut. Bappeda Litbang selaku Badan Perencanaan dan berhubungan langsung dengan Perencanaan OPD. Sebagaimana kegiatan Bappeda Litbang dibawah ini ;



Gambar 3.7
 Sosialisasi Penginputan dan Verifikasi
 Usulan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2025
 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Litbang Tarakan



Gambar 3.8

Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan Se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 bertempat di Tana Kining Kabupaten Bulungan



Gambar 3.9

Peningkatan Kapasitas Bappeda Litbang melalui Rapat Koordinasi Bappeda Litbang Se-Kalimantan Utara di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

Perencanaan kinerja kabupaten/Kota, provinsi, dan nasional adalah keselarasan antara perencanaan daerah dengan perencanaan nasional. Sinergitas ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, dan berkelanjutan. Capaian Komponen Perencanaan Kinerja dan Capaian Komponen Pengukuran Kinerja yang dimaksudkan dalam sasaran Renstra ini adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh tujuan organisasi tercapai melalui penyelarasan antara RKPD Kota Tarakan tahun 2025 dengan dokumen perencanaan

perangkat daerah, tidak berdiri sendiri namun juga harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Program prioritas pembangunan merujuk pada serangkaian kebijakan, proyek, atau kegiatan yang dianggap sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan dalam periode tertentu, guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Program ini biasanya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan, potensi daerah, dan tantangan yang dihadapi dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pentingnya program prioritas adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun waktu, dapat digunakan secara efisien dan efektif. Program ini juga bertujuan untuk memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat dan menciptakan perubahan positif yang signifikan.

Program prioritas pembangunan biasanya berasal dari beberapa sumber utama, yang antara lain meliputi pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yaitu dokumen perencanaan yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam periode lima tahun. Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN adalah sumber utama pendanaan bagi program-program pembangunan nasional yang mencakup sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain sedangkan APBD digunakan untuk mendanai program-program prioritas di tingkat daerah yang mencakup pembangunan daerah, peningkatan layanan publik, dan penanggulangan masalah lokal. Ketiga, Kebijakan Pemerintah Pusat atau Daerah. Pemerintah pusat atau daerah sering kali menetapkan kebijakan dan program prioritas berdasarkan situasi terkini, misalnya penanganan pandemi, krisis ekonomi, atau bencana alam. Kebijakan ini kemudian menjadi panduan untuk merumuskan program prioritas pembangunan. Keempat, Hasil Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan, dimana Program prioritas dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dari program-program sebelumnya. Program prioritas memiliki sifat lintas sektor/cross-cutting, sehingga pelaksanaannya tidak hanya dijalankan oleh satu Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab program prioritas memiliki peran sebagai koordinator dan tetap menjaga kolaborasi dengan perangkat daerah atau pemangku kepentingan lain. Program prioritas dirumuskan menggunakan metode cascading mulai dari tujuan, sasaran dan outcome. Dalam

rangka membangun sinergi antara pendekatan politik dan teknokratik, program prioritas juga berupaya mengkerangkai program janji politik Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dengan rumusan kinerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan yang termasuk didalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Rencana program prioritas pada unsur perencanaan dan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- d. Penelitian dan Pengembangan

2. Sasaran (SS.2) : *Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.*

Meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif dan bersinergi antar tahapan, sehingga dapat memotret secara objektif gap/kesenjangan untuk segera dilakukan perbaikan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengendalian dan evaluasi perencanaan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu :

- a. *Ex-ante evaluation* yaitu pengendalian dan evaluasi dilakukan pada saat penyusunan dokumen perencanaan;
- b. *On-going evaluation* yaitu pengendalian dan evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan perencanaan;
- c. *Ex-post evaluation* yaitu pengendalian dan evaluasi dilakukan pada hasil perencanaan.

Dengan pengendalian dan evaluasi pada saat penyusunan perencanaan, terpantau apakah perencanaan pembangunan daerah sudah sesuai tahapan, sesuai sistematika dan timeline yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan. Apakah perencanaan pembangunan tahunan telah selaras dengan RPJMD. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan pada hasil perencanaan digunakan sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

2. Pada saat verifikasi rancangan Renja dan rancangan akhir Renja perangkat daerah mitra, sekaligus harus dilakukan verifikasi indikasi program pada dokumen RTRW yang harus dilaksanakan oleh perangkat Daerah pada tahun ke-n, sehingga amanat Perda RTRW terlaksana sesuai timeline yang tercantum dalam dokumen RTRW;
3. Meningkatkan kualitas pendampingan dan verifikasi perencanaan perangkat daerah. Proses pendampingan dan verifikasi terhadap perencanaan perangkat daerah kurang optimal dalam menyentuh detail substansi, karena seringkali perangkat daerah tidak disiplin/tidak tepat waktu pada timeline yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) yaitu mengumpulkan draft Renstra pada saat pelaksanaan verifikasi, yang seharusnya dikumpulkan pada H-10. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan akhir Renja harus disampaikan ke Bappeda paling lambat 1 minggu setelah penetapan Perwal tentang RKPD, dan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir harus diverifikasi oleh Bappedalitbang. Ke depan perlu dilakukan pembenahan metode verifikasi perencanaan perangkat daerah agar lebih optimal;
4. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap proses perencanaan pembangunan mulai dari tahapan, sistematika, ketepatan waktu, dan keselarasan antar dokumen. Perencanaan pembangunan perangkat daerah seringkali tidak sesuai dengan kaidah yang diamanatkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak tepat waktu tiap tahapannya;
5. Optimalisasi kemampuan SDM pelaksana verifikasi perencanaan perangkat daerah dengan mendorong tersedianya fungsional Perencana yang secara berkala melakukan pelatihan dan Bimtek Perencanaan untuk mengupgrade kompetensi dan wawasan terkait perencanaan pembangunan;

6. Meningkatkan implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam upaya mendorong daya saing daerah yang mendukung perencanaan pembangunan Kota Tarakan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara berkala untuk mengetahui sejauh mana implementasi pelaksanaan program indikatif pada dokumen SIDa, apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu ditingkatkan secara kualitas dalam upaya menjawab permasalahan/isu strategis Kota Tarakan;
8. Penelitian dan pengembangan diarahkan untuk dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah terutama peningkatan kualitas perencanaan. Penelitian dan pengembangan (Litbang) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemology maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peran litbang dalam tata Kelola pemerintahan adalah mengidentifikasi setiap permasalahan baik yang bersifat aktual maupun prediktif yang berkembang di daerah. Hasil penelitian dan pengembangan diharapkan dapat digunakan dalam penyusunan dokumen yang dapat jadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah untuk Pembangunan daerah.

3. Sasaran (SS.3) : *Meningkatnya kualitas hasil inovasi*

Beberapa kebijakan pemerintah saat ini tidak memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap kinerjanya. Pemerintah butuh penyesuaian yang tepat melalui upaya inovasi daerah untuk menyelesaikan dampak perubahan tersebut. Jika bertahan dengan kondisi status quo akan mengekspos lemahnya peran pemerintah ke publik sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Selain itu, lambatnya penyesuaian terhadap perubahan akan membuat biaya penyelenggaraan pemerintahan membengkak karena terbukti tidak efisien lagi dan tidak sesuai zaman.

Penyelenggaraan inovasi daerah masih sering dianggap sebagai beban kerja tambahan. Akan tetapi, jika kita menyimak PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah maka akan kita dapati bahwa tujuan utama dari inovasi daerah

adalah perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan itu berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dimaknai sebagai hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan pendekatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan inovasi daerah semestinya inheren (melekat) dalam program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Artinya, setiap pelaksanaan program atau kegiatan pada masing-masing perangkat daerah harus diperkuat dengan inovasi.

Pemerintah Kota Tarakan melalui misi IV RPJMD periode 2025-2029, menyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Kota Tarakan yang berjaya adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital (Smart Government) dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kemauan dan kemampuan dari seluruh personil perangkat daerah untuk berinovasi.

Bappeda Litbang dalam kontribusi menjaga kualitas hasil inovasi dengan persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan melakukan perbaikan kualitas inovasi yang ditandai dengan:

- a) implementasi inovasi yang terukur dan terarah melalui penyusunan kerangka kerja rencana aksi inovasi yang dikawal melalui monitoring secara berkala.
- b) inovasi yang dilaksanakan sepenuhnya melekat dengan kegiatan sehingga otomatis berdampak terhadap percepatan perbaikan indikator kinerja OPD.

Terinspirasi dari pengukuran IID yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri dimana IID tersebut terdiri dari 2 Aspek (Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi), masing-masing aspek juga terdiri dari 8 variabel, dan berikutnya ada 36 indikator. Semua struktur itu merupakan hal yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Artinya inovasi daerah harus melalui tahapan perencanaan yang matang, kemudian diimplementasikan dengan benar, dan terakhir dievaluasi untuk mendapatkan masukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik ke depannya dengan

memperhatikan aspek indeks inovasi daerah tersebut beserta turunannya. Selanjutnya rencana dan realisasi capaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil inovasi ditampilkan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Capaian
Meningkatnya Kualitas Hasil Inovasi

	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian Terhadap Akhir Renstra Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	100%	80%	93,62%	117,03	88	109,56

Sumber: Bappeda Litbang Kota Tarakan, diolah

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan adalah 80%, realisasi sebesar 117,03%, tercapai 109,56% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Apa bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023.

Target capaian tahun 2025 (akhir Renstra) sebesar 88% Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 109,56% dari target akhir Renstra tahun 2025.

Data pendukung dalam pencapaian indikator Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan ditampilkan dalam tabel 3.8:

Tabel 3.9
Data Jumlah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun 2025
1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Dokumen	2
2	Jumlah seluruh hasil penelitian dan pengembangan	Dokumen	3

Sumber: Bappeda Litbang Kota Tarakan, diolah

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang berkaitan dan mendukung indikator kinerja Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan pada tahun 2025:

Pemerintah Kota Tarakan

LOMBA INOVASI DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025

PENDAFTARAN DIPERPANJANG

Sampai Tanggal 27 November 2025

Dapatkan Hadiahnya !!

- Uang Pembinaan
- Plagam Penghargaan

Daftar Segera !!!

Link Pendaftaran : <https://bit.ly/LombaInovasi2025>

Erwan (085348184866) Malati (081560507975)



Gambar 3.10
Kegiatan Presentasi Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025
Diselenggarakan di ruang Kenawai Tarakan



Gambar 3.11
Kegiatan Penyerahan Piagam dan Uang Pembinaan kepada
Pemenang Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025



Gambar 3.123
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Daerah
Kota Tarakan Tahun 2025-2029 bertempat di ruang rapat Bappeda Litbang Tarakan

Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang sudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis dan/atau Kebijakan Pemerintah Daerah.

Melalui inisiatif seperti pemetaan data sectoral yang menjadi sarana modern untuk pelayanan dan efektivitas data pemerintah Bappeda Litbang juga melaksanakan forum Satu Data Indonesia (SDI), merupakan bagian dari upaya inovasi tata Kelola data untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik. Kegiatan ini seperti FGD dan penyusunan data spasial berfungsi sebagai sarana koordinasi anta instansi/OPD agar data akurat, terintegrasi dan mudah diakses.



Gambar 3.13
Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Tarakan Tahun 2025
bertempat di ruang Serbaguna Kota Tarakan

Faktor pendukung pencapaian IKU, antara lain:

- a. Adanya Perguruan Tinggi yang sudah berjalan efektif Universitas Borneo
- b. Adanya peluang dan kesempatan untuk kerjasama dengan *stakeholder* lebih terbuka dengan BRIN, Universitas Lokal maupun dari luar

Faktor penghambat pencapaian IKU, yaitu:

- a. Belum optimalnya monitoring penelitian yang dilaksanakan di Perangkat

Daerah

- b. Lemahnya akses hasil penelitian, karena izin penelitian langsung kepada Perangkat Daerah/instansi yang bertanggungjawab pada objek penelitian.

Permasalahan :

1. Belum semua hasil penelitian sinergi dengan kebutuhan perencanaan daerah
2. Belum membudayanya inovasi

Solusi :

- Koordinasi intensif Forum Perguruan Tinggi dan BRIN
- Koordinasi dengan Daerah lain terutama yang daerah jawa yang sudah matang.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan diseminasi riset dan inovasi yang lebih massif;
- b. Harmonisasi dengan pihak-pihak terkait.

4. Sasaran (SS.4) : *Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang*

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Pada sasaran Meningkatkan tata kelola Bappeda Litbang dengan 2 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2025 dan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 – 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2022	2023		2024			2025			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
3.	Meningkatnya Tata Kelola Bappedalitbang	Nilai SAKIP	75 (BB)	77.50 (BB)	75 (BB)	78,96 (BB)	78 (BB)	80,74 (A)	110.37	80,74 (A))	86,55 (A)*	107,20
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	81,04	80	82,77	83,11	85,89	103,33	86	92,75	107,85

***Data Hasil Evaluasi Mandiri eSakip PRO Tahun 2025**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Meningkatkan tata kelola Bappeda Litbang pada tahun 2025 pada indikator Nilai SAKIP sebesar 80,74 (A), jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 78 (BB) maka tingkat ketercapaian terhadap target renstra sebesar 107,20% dengan tingkat kemajuan tercapai.

Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda Litbang, apabila disandingkan data awal dan data realisasi dan capaian dari tahun ke tahun, mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan.

Perbaikan atau solusi yang dilakukan untuk peningkatan Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) antara lain :

- Penyelarasan Dokumen Perencanaan (Cascading)
- Fokus pada Hasil (Outcome) bukan Output (Pelaporan kinerja berorientasi pada dampak hasil)
- Digitalisasi dan Integrasi Sistem (e-SakipPRO)
- Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

Sedangkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan cara :

- Digitalisasi Layanan
- Peningkatan Kompetensi SDM
- Restrukturisasi Layanan (inovasi, deregulasi dan penyederhanaan prosedur)

Integrasi antara indikator Nilai SAKIP dan IKM adalah :

- Penerapan RB Tematik : mengaitkan target kinerja (SAKIP) dengan penyelesaian masalah utama masyarakat (penurunan stunting, kemiskinan)
- Audit Kinerja Berbasis IKM : menggunakan data IKM sebagai indikatro kinerja utama dalam laporan SAKIP untuk menunjukkan dampak nyata kinerja instansi kepada masyarakat.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Kalimantan No.1 Kota Tarakan 77113
Telp (0551) 21620, 21623 Fax (0551) 33846

Laman : <http://www.tarakankota.go.id> Pos-el : sekda@tarakankota.go.id

Tarakan, 3 Oktober 2025

Nomor : 000.8.6.3 / 469 / ORG
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir
di
Tarakan

Dalam rangka penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan, maka salah satu program kerja kedepannya adalah melaksanakan pengukuran kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP Pro yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Manajemen dan Sistem Informasi (PPMSI) Indonesia. Untuk penguatan kapasitas admin e-SAKIP Perangkat Daerah, akan dilaksanakan Pelatihan Penguatan Aplikasi e-SAKIP Pro :

tanggal : 7 - 8 Oktober 2025
waktu : 08.30 – 16.00 Wita
tempat : Ruang Rapat Bappeda Litbang Kota Tarakan
acara : Pelatihan Penguatan Aplikasi e-SAKIP Pro

Untuk efektifnya acara yang dimaksud, diminta agar Kepala Perangkat Daerah menugaskan pegawai sebagaimana terlampir untuk hadir dengan membawa laptop. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Kurnain Agie S. SE (081253172217) dan Saudari Siska Erlina, S.Kom (085246399909).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Ir. Jamaludin
Pembina Utama Madya / IVd
NIP. 196604211995031004

Tembusan:
Wali Kota Tarakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 3.14
Penguatan Aplikasi e-SakipPRO Tahun 2025



Gambar 3.15
Penguatan Aplikasi e-SakipPRO Tahun 2025

Meningkatnya Indeks Kualitas Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025, dengan Nilai IKM target sebesar 86 sudah tercapai dengan realisasi sebesar 92,75 (capaian 107,85 % - peringkat capaian kinerja "sangat tinggi"). Apabila dibandingkan dengan tahun 2024.

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman umum penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik Bappeda Litbang kota Tarakan telah melakukan pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Bappeda Litbang kota Tarakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada Bappeda Litbang kota Tarakan dalam kategori baik 81.26-100.0 atau mutu pelayanan dengan nilai B Baik.



Gambar 3.16
Pelaksanaan SKM Tahun 2025 bertempat di ruang Imbaya Tarakan



Gambar 3.17
Pelaksanaan SKM Tahun 2025 bertempat di ruang rapat Bappeda Litbang Tarakan



Capaian kinerja organisasi adalah hasil akhir, tolak ukur atau tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi atau tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi serta program dalam mewujudkan visi misi dan saaran strategis yang telah ditetapkan. Ini merupakan nilai akumulasi nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam periode tertentu. Secara ringkas Capaian Kinerja Organisasi Bappeda Litbang adalah gambaran sejauhmana Bappeda Litbang berhasil melaksanakan tanggung jawab utamanya.



Gambar 3.18
Kepala Bappeda beserta Tim Persiapan Penilaian Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025
bertempat Bappeda Litbang Tarakan

Capaian Kinerja Organisasi Bappeda Litbang secara umum menunjukkan kinerja tinggi dalam hal perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan pelayanan publik. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan, sinergitas dan pengoptimalan teknologi atau system informasi meskipun sering dihadapi kendala anggaran dan SDM. Poin-poin utama dalam Capaian Kinerja Bappeda Litbang antara lain ;

- Peningkatan Kualitas Perencanaan
- Akuntabilitas Kinerja
- Pelayanan Publik (IKM)
- Optimalisasi Inovasi Daerah
- Realisasi Anggaran

Pencapaian ini didukung oleh evaluasi berkala dalam system pelaporan yang terstruktur untuk mengukur efektivitas, sebagaimana tergambar dibawah ini :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Organisasi
Bappeda Litbang Tahun 2025

NO	SASARAN (TAHUNAN) - PK KEPALA PD		INDIKATOR (TAHUNAN) - IKI KEPALA PD	TARGET (TAHUNAN)	TARGET FINAL	REALISASI FINAL	CAPAIAN REALISASI FINAL	NORMALISASI CAPAIAN PK	KOREKSI NORMALISASI CAPAIAN PK BERDASARKAN PREDIKAT AKIP	NILAI AKHIR CAPAIAN PK (7) X (100%- (8))
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	1	Capaian komponen perencanaan kinerja (persentase) (%)	74,5	74,5	76,10	102,15%	102,15%	0%	102,15%
2	Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2	Capaian komponen pengukuran kinerja (persentase) (%)	60	60	59,03	98,38%	98,38%	0%	98,38%
2	Meningkatnya kualitas hasil inovasi	3	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan (%)	80%	80%	93,62%	117,03%	110,00%	0%	110,00%
3	Meningkatnya tata kelola Bappedalitbang	4	Nilai SAKIP (Nilai)	80.74/A	80,74	86,55	107,20%	107,20%	0%	107,20%

NO	SASARAN (TAHUNAN) - PK KEPALA PD		INDIKATOR (TAHUNAN) - IKI KEPALA PD	TARGET (TAHUNAN)	TARGET FINAL	REALISASI FINAL	CAPAIAN REALISASI FINAL	NORMALISASI CAPAIAN PK	KOREKSI NORMALISASI CAPAIAN PK BERDASARKAN PREDIKAT AKIP	NILAI AKHIR CAPAIAN PK (7) X (100%- (8))
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86	86	92,72	107,81%	107,81%	0%	107,81%
Total Capaian PK										525,54%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK										105,11%
Predikat PKO										ISTIMEWA

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan dapat dilihat dari penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp. 6.960.753.419,- dari total anggaran sebesar Rp. 7.435.441.611,- dengan capaian keuangan sebesar 93,62% dan capaian fisik 98,37% Sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.281.221.474,- atau sebesar 92,75% dan serapan capaian fisik 97,46% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.928.453.583,00,- Realisasi anggaran tersebut di dalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	SS.1 Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	789,325,010.00	10,50%
2	SS.2 Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	459,564,970.00	6,16%
3	SS.3 Meningkatnya kualitas hasil inovasi	242.162.530.00	3,24%
4	SS.4 Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang	5,944,389,101.00	79,80%
Jumlah		1,491,052,510.00	20,00%
Belanja Pendukung		5,944,389,101.00	80,00%
Total Belanja		7,435,441,611.00	100%

Sumber : Bappeda Litbang, Tahun 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan

sebesar Rp 1,491,052,510.00 atau sebesar 20,00% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 5,944,389,101.00 atau sebesar 80,00% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang dengan besaran anggaran 80,00% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas hasil inovasi sebesar 3,24% dari total anggaran belanja.

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 5,097,024,187.00 terealisasi sebesar 96,33 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai sebelum masa bakti selesai (meninggal), mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	789,325,010.00	753,477,531.00	95,46%
2	Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	459,564,970.00	318,948,110.00	69,40 %
3	Meningkatnya kualitas hasil inovasi	242.162.530.00	225.452.385.00	93,10 %
4	Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang	5,944,389,101.00	5,662,875,393.00	95,26%
Jumlah		1,491,052,510.00	1,297,878,026.00	87,04%
Belanja Pendukung		5,944,389,101.00	5,662,875,393.00	95,26%
Total Belanja		7,435,441,611.00	6,960,753,419.00	93,62%

Sumber: Bappeda Litbang, Tahun 2025

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 93,62% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 87,04 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,26%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai predikat tinggi dan sangat tinggi sebesar 95,26%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Capaian komponen pengukuran kinerja sebesar 69,40%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut

Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Capaian komponen perencanaan kinerja	74,5	76,10	102,15	789,325,010.00	753,477,531.00	95,46%
2	Capaian komponen pengukuran kinerja	60	59,03	98,38	459,564,970.00	318,948,110.00	69,40%
3	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	80	96,62	117,03	242.162.530.00	225.452.385.00	93,10%
4	Nilai SAKIP	80.74 (A)	86,55 *	107,20			
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	92,75	107,85	5,944,389,101.00	5,662,875,393.00	95,26%

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD tahun 2025

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin

rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,14%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,05%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar 1,44%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil terdapat pada 2 program/kegiatan di IKU Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang sebesar 1,05%.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama dan per sasaran strategis disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Capaian komponen perencanaan kinerja	789,325,010.00	753,477,531.00	35,847,479.00	1.05
2	Capaian komponen pengukuran kinerja	459,564,970.00	318,948,110.00	140,616,860.00	1,44
3	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	242.162.530.00	225.452.385.00	16,710,145.00	1,07
4	Nilai SAKIP	5,944,389,101.00	5,662,875,393.00	281,513,708.00	1,05
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
Jumlah		1,491,052,510.00	1,297,878,026.00	193,174,484.00	1,14
Belanja Pendukung		5,944,389,101.00	5,662,875,393.00	281,513,708.00	1,05
Total Belanja		7,435,441,611.00	6,960,753,419.00	474,688.192.00	1,07

Sumber : Bappeda Litbang 2025 (diolah)

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Bappeda Litbang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SS.1 Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Capaian komponen perencanaan kinerja	74,5	76,10	102,15	789,325,010.00	753,477,531.00	95,46	35,847,479.00	1,07 (Efisien)
2	SS.2 Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian komponen pengukuran kinerja	60	59,03	98,38	459,564,970.00	318,948,110.00	69,40	140,616,860.00	1,41 (Efisien)
3	SS.3 Meningkatnya kualitas hasil inovasi	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	80	93,62	117,03	242.162.530.00	225.452.385.00	93,10	16,710,145.00	1,25 (Efisien)
4	SS.4 Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang	Nilai IKM	80,74 (A)	86,55 *	107,20	5,944,389,101.00	5,662,875,393.00	95,26	281,513,708.00	1,13 (Efisien)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	92,75	107,81					
Rata - rata					106,5	7,435,441,611.00	6,960,753,419.00	88,31	474,688,192.00	1,20 (Efisien)

Sumber: Bappeda Litbang Tahun 2025

* Tingkat Efisiensi Sasaran 4 menggunakan evaluasi penilaian mandiri e-Sakip PRO sambil masih menunggu hasil LHE Inspektorat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sasaran program prioritas yang mendukung sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi sasaran "SS.1 Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah" sebesar 1,07 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 76,10% diperlukan capaian anggaran sebesar 95.46 %.
2. Tingkat efisiensi sasaran "SS.2 Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah" sebesar 1,41 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 97,00% diperlukan capaian anggaran sebesar 69.40 %;
3. Tingkat efisiensi sasaran "SS.3 Meningkatnya kualitas hasil inovasi" sebesar 1,25

atau efisien karena dengan capaian kinerja sebesar 117,03 % diperlukan capaian anggaran sebesar 93,10 %.

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Bappeda Litbang melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 7,435,441,611.00, terealisasi Rp. 6,960,753,419.00 atau 93,62% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien. Terdapat efisiensi Rp. 474,688,192.00 atau 6,38% yang bersumber dari kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi anggaran masih tersisa, disebabkan antara lain :

- Optimalisasi Biaya
- Penetapan Target yang terlalu Tinggi
- Efisiensi Operasional

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya untuk mencapai target, selain diperlukan sumber daya manusia juga dibutuhkan input lain berupa anggaran. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.

Sumber pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun 2025, yang diuraikan pada tabel dibawah:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Tahun 2025

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2025		CAPAIAN KEU. (%)
		TARGET	REALISASI	
SASARAN (SS 1) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Capaian komponen perencanaan kinerja	74,5	76,10	102,15
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja Pembangunan daerah	789.325.010,00	753.477.531,00	97,92
Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	618.172.000,00	584.747.899,00	94,59
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)			
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	491.740.700,00	483.629.304,00	98,35
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	32.082.300,00	29.677.365,00	92,50
Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	65.377.300,00	43.882.266,00	67,12
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	28.971.700,00	27.558.964,00	95,12

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah	77.209.410,00	76.478.896,00	99,05
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	77.209.410,00	76.478.896,00	99,05
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	93.943.600,00	92.250.736,00	98,20
Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	93.943.600,00	92.250.736,00	98,20
SASARAN (SS 2) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	60	58,20	69,40
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian kinerja pembangunan pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian	459.564.970,00	318.948.110,00	69,40
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD	238.436.770,00	151.927.245,00	63,72
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.731.070,00	26.984.260,00	85,04
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.250.000,00	390.000,00	9,18
Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.250.000,00	4.200.000,00	98,82

Koordinasi Pelaksana Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	22.070.500,00	17.508.429,00	79,33
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP JPD, RP JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.308.800,00	48.531.227,00	86,19
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.500.000,00	2.400.000,00	28,24
Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.803.400,00	1.318.840,00	27,46
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	106.523.000,00	50.594.489,00	47,50
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	137.817.500,00	86.663.985,00	62,88
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.538.420,00	3.476.265,00	8,58

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	39.954.480,00	33.905.360,00	84,86
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.655.600,00	21.632.360,00	95,48
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	34.669.000,00	27.650.000,00	79,75
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.310.700,00	80.356.880,00	96,45
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.410.700,00	13.456.880,00	82,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	66.900.000,00	66.900.000,00	100,00
SASARAN (SS 3) Meningkatnya kualitas hasil inovasi	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	93,62	93,10
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	93,62	93,10
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	121.897.400,00	109.666.602,00	89,97
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	121.897.400,00	109.666.602,00	89,97

Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	120.265.130,00	115.785.783,00	96,28
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			
Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	93.401.530,00	90.036.695,00	96,40
Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	26.863.600,00	25.749.088,00	95,85
SASARAN (SS.4) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Litbang	Nilai SAKIP (Nilai)	80,74 (A)	86,55 (A)	95,26
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86	92,75	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	5.944.389.101,00	5.662.875.393,00	95,26
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.640.000,00	5.240.000,00	68,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan CVapain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	1.680.000,00	0,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.280.000,00	3.560.000,00	83,18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.148.270.187,00	.956.282.505,00	96,27

	(Dokumen)			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.097.024.187,00	4.909.806.505,00	96,33
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.246.000,00	46.476.000,00	90,69
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	283.315.761,00	245.122.161,00	86,52
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.974.800,00	4.349.834,00	87,44
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.050.770,00	46.054.414,00	77,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.303.841,00	8.023.997,00	96,63
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20.958.900,00	20.487.263,00	97,75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.027.450,00	166.206.653,00	87,46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	116.460.800,00	115.869.700,00	99,49
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	60.000.000,00	59.700.000,00	99,50
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20.000.000,00	19.946.700,00	99,73
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.460.800,00	36.223.000,00	99,35
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	217.672.931,00	175.756.246,00	80,74
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	1.047.000,00	38,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	182.577.131,00	142.439.556,00	78,02
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.395.800,00	2.269.690,00	94,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	171.029.422,00	164.604.781,00	96,24
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40.106.000,00	39.163.900,00	97,65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60.550.000,00	55.782.800,00	92,13
Pemeliharaan /Rehabilitasi \Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29.000.000,00	28.500.000,00	98,28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41.373.422,00	41.158.081,00	99,48

Sumber : Laporan Konsolidasi RFK Bappeda Litbang Tahun 2025

Dari Anggaran Tahun 2025, terlihat bahwasanya sasaran strategis didukung anggaran yang terdapat didalam DPA Bappeda Litbang yaitu sebesar Rp. **7.435.441.611,00** dan dapat terealisasi sebesar Rp. **6.960.753.419,00** sehingga serapan capaian keuangan menunjukkan angka **93,62 %**. dan serapan capaian fisik **98,37 %**.

► Perbandingan Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan

Adapun sumber dana Bappeda Litbang yaitu bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2025, diisajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan
Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2023-2025

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
1	2023	5.800.663.712,00	5.347.374.110,00	453.289.602,00	92,19	1,08
2	2024	8.928.453.583,00	8.281.221.474,00	647.232.109,00	92,75	1,08
3	2025	7.435.441.611,00	6.960.753.419,00	474.688.192,00	96,62	1,07

Apabila dicermati pada realisasi belanja masing-masing program sebagaimana tabel 3.21 maka dapat dirangkum ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Program Prioritas dan Pendukung Sasaran Strategis
Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja Pembangunan daerah (persentase)	95,46%
2	Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian kinerja Pembangunan pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian (%)	69,40%
			Capaian Kinerja Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persentase) (%)	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya kualitas hasil inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	93,10%
4	Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	95,26%

E. LINTAS SEKTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Tarakan yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat maka Bappeda Litbang ikut mendukung kegiatan lintas sektor dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Tabel 3.20
Lintas Sektor Bappeda Litbang Kota Tarakan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappeda	Penyelarasan RKPD dengan RPJMD	Dokumen perencanaan	46 Perangkat Daerah	Manfaat bagi Bappeda: Mendukung pencapaian tujuan RPJMD dan mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeda Manfaat bagi kelompok sasaran: Acuan pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan
		BPKPAD	Kebijakan penganggaran, SHBJ			
		DPRD	Pokok Pikiran DPRD			
		Bagian Hukum Setda	Penetapan peraturan/keputusan Walikota			
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan			
		Perguruan Tinggi	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
		LSM/ Ormas	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
		Masyarakat	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
2.	Penyusunan Dokumen/	Bappeda	Mengkoordinasi penyusunan LKPJ	Dokumen/ laporan	30 Perangkat Daerah	Manfaat bagi Bappeda:

NO	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	DPRD	Kolaborasi pembentukan pansus dalam rangka pembahasan LKPJ hingga menghasilkan catatan rekomendasi LKPJ	evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah		Mendukung pencapaian kinerja tujuan RPJMD dan mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeda Litbang
		BPKPAD	Pertanggungjawaban anggaran			Manfaat bagi kelompok sasaran: Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sub kegiatan dapat menjadi masukan perencanaan tahun berikutnya
		Inspektorat	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah			
		Bagian Hukum Setda	Pembahasan peraturan/keputusan Walikota			
3.	Penyelenggaraan Satu Data	Wali data pendukung dan produsen data	Menyampaikan data dan metadata kepada walidata	Data statistik, data geospasial	Perangkat Daerah Kota Tarakan	Manfaat bagi kelompok sasaran: Hasil kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, dan dapat dimanfaatkan oleh publik
		BPS	Pembina data statistik			
		BIG	Pembina data spasial			

F. PRESTASI YANG DIRAIH BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN TAHUN 2025

Pencapaian kinerja yang dihasilkan Bappeda Litbang Kota Tarakan pada tahun 2025 antara lain :

- Juara III Penilaian Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Tahun 2025 oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta tanggal 12 November 2025.





Gambar 3.19
Penghargaan Penilaian evaluasi kinerja Pencegahan dan Penurunan Stunting

- Juara II Pengawasan Kearsipan Internal Di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025.





Gambar 3.20
Penghargaan Pengawasan Kearsipan
Tingkat Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025

- program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025 dengan skor 52,91 sehingga dapat dikategorikan sebagai "The Exciter" dalam pencapaian SDGs di tingkat pemerintah kota seluruh Indonesia.



Gambar 3.21
Penghargaan Program I-Sim Tahun 2025

- Juara Favorit Lomba Senam KORPRI Tahun 2025



Gambar 3.22
Penghargaan Lomba Senam KORPRI
Tingkat Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029. Selain itu pelaksanaan kegiatan di Bappeda Litbang Kota Tarakan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Capaian kinerja Bappeda Litbang tahun 2025 secara rata-rata pada tahun 2025 adalah sebesar 105,36% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja output dan outcome. Keberhasilan yang dicapai berkat kolaborasi dan peran aktif dari semua pemangku kepentingan dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu dievaluasi dan kemudian dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahannya, sehingga perlu dukungan dari semua pihak yang berkepentingan agar bisa mewujudkan target yang sudah ditetapkan sehingga capaian kinerja berhasil.

Diketahui dari sejumlah 5 indikator dari 4 sasaran kinerja utama dari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Capaian komponen perencanaan kinerja (persentase) realisasi 102,15% dari target dengan kategori "Sangat Tinggi"
2. Capaian komponen pengukuran kinerja (persentase) realisasi 98,38% dari target dengan kategori "Tinggi"
3. Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan (persentase) dengan realisasi 117,03% dari target dengan Kkterior "Sangat Tinggi"
4. Nilai SAKIP (Nilai) dengan realisasi 107,20% dari dari target dengan kategori "Sangat Tinggi"
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) realisasi 107,85% dengan kategori "Sangat Tinggi".

Pencapaian realisasi anggaran Bappeda Litbang Kota Tarakan tergolong baik, hal

ini terlihat dari anggaran APBD perubahan Bappeda Litbang sebesar Rp 7.435.441.611,00 dapat terealisasi sebesar Rp 6.960.753.419,00 atau 93,62%. Program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara optimal, dengan rincian sebagai berikut:

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran sebesar Rp 5.944.389.101,00 dapat terealisasi sebesar Rp 5.662.875.393,00 realisasi kinerja sebesar 99,60 %.
7. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 789.325.010,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 753.477.531,00 realisasi kinerja 99,31%.
8. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 459.564.970,00 realisasi kinerja sebesar Rp 318.948.110,00 atau 81,51 %.
9. Program Penelitian dan Pengembangan dengan total anggaran sebesar Rp 242.162.530,00 dengan realisasi kinerja sebesar Rp 225.452.385,00 atau sebesar 95,51 %.

Hasil pengukuran kinerja ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya agar memiliki kinerja yang lebih baik dan semakin memberikan manfaat, tidak hanya bagi internal Bappeda Litbang dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, tetapi juga masyarakat Kota Tarakan secara keseluruhan.

B. Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan, meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran selaras dengan RPJMD dan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Meningkatkan peran Bappeda Litbang dalam mengawal pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah melalui implementasi program, kegiatan

dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

- c. Mendorong seluruh Perangkat Daerah dalam meningkatkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan penyediaan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada penyelesaian isu strategis pembangunan daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas perencanaan, baik internal Bappeda Litbang maupun Pemerintah Kota Tarakan secara keseluruhan

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- 1) Cascading
- 2) Peta Proses Bisnis
- 3) Rencana Aksi Tahun 2025
- 4) LRA per 31 Desember 2025
- 5) Laporan Konsolidasi Pembangunan / Realisasi Fisik dan Keuangan
Bulan Desember 2025

CASCADING

Tujuan	Sasaran	Outcome antara (Program)	Outcome antara (Kegiatan)	Output	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas					Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah				Capaian komponen perencanaan kinerja	
		Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	5.0102 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	5.0102 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan disusun tepat waktu		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan disusun tepat waktu	5.0102.01- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD M aka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.0102.2.010001- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
				Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.0102.2.010002- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.0102.2.010005- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.0102.2.010007- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Persentase data perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan	5.0102.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.0102.2.02.0001- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.0103 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

			Tertaksananya koordinasi perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah program yang konsisten antara Renja dengan RKPD Murni, Perubahan Renja dengan RKPD Perubahan, dan Renstra dengan RPJM D/ Renstra Perubahan dengan RPJM D Perubahan	5.0103.2.01- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJM D dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM D dan RKPD) (Dokumen)	5.0103.2.010001- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJM D dan RKPD)
				Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.0103.2.010002- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.0103.2.010008- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJM D dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM D dan RKPD) (Dokumen)	5.0103.2.010005- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJM D dan RKPD)
				Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.0103.2.010006- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.0103.2.010008- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Setarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur	5.0103- PROGRAM KOORDINASIDAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	5.0103- PROGRAM KOORDINASIDAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Tertaksananya koordinasi perencanaan di bidang Perekonomian dan SDA		Jumlah program yang konsisten antara Renja dengan RKPD Murni, Perubahan Renja dengan RKPD Perubahan, dan Renstra dengan RPJM D/ Renstra Perubahan dengan RPJM D Perubahan	5.0103.2.02- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJM D dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM D dan RKPD) (Dokumen)	5.0103.2.02.0001- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJM D dan RKPD)
				Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.0103.2.02.0002- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.0103.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Terkordinnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.0103.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.0103.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.0103.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
			Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang Infrastruktur		Jumlah program yang konsisten antara Renja dengan RKPD Murni, Perubahan Renja dengan RKPD Perubahan, dan Renstra dengan RPJMD/ Renstra Perubahan dengan RPJMD Perubahan	5.0103.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				Terkordinnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.0103.2.03.0001- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.0103.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.0103.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah				Capaian komponen pengukuran kinerja	
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			Capaian Kinerja Pembangunan daerah	5.0102 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	5.0102.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.0102.2.03.0005 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			Capaian Kinerja Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.0103 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

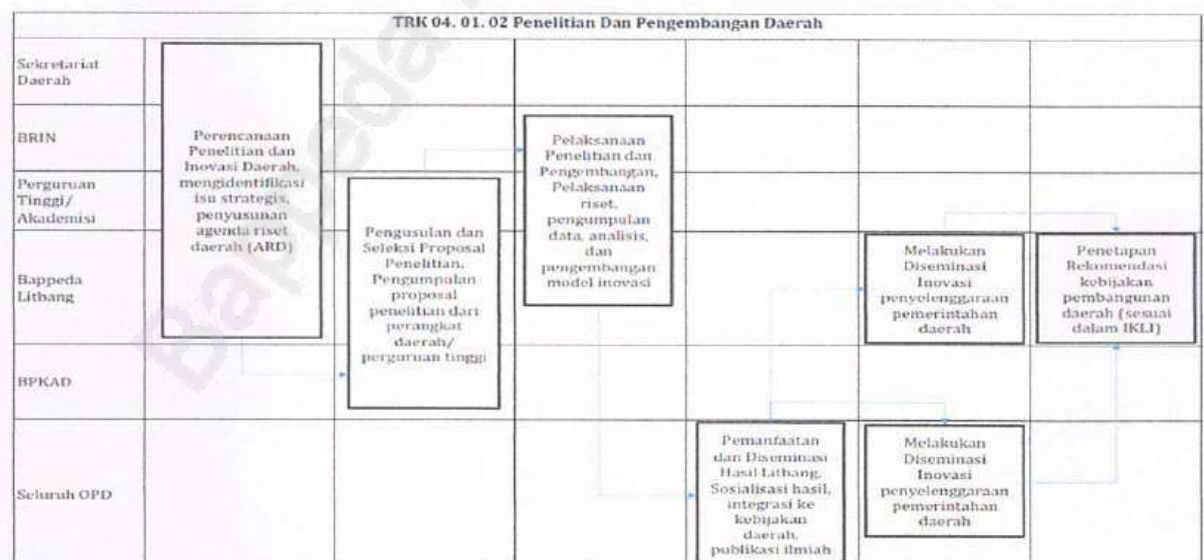
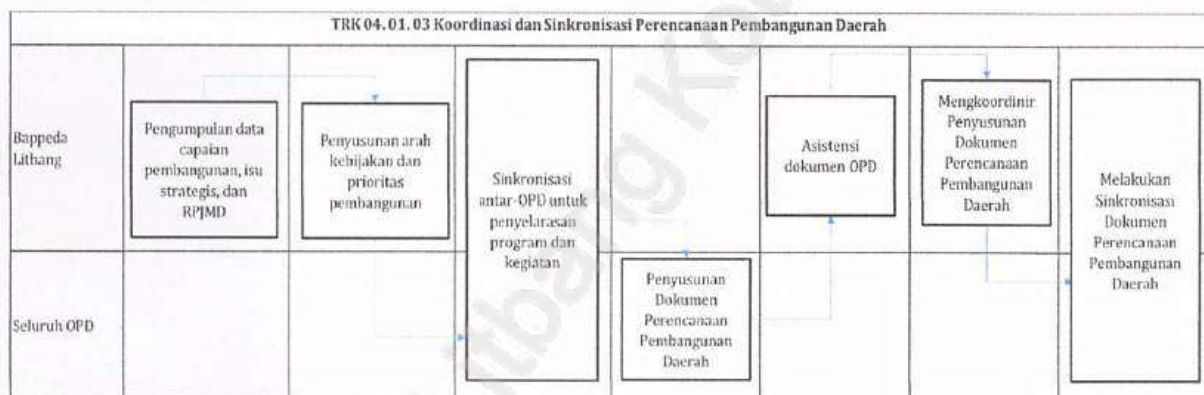
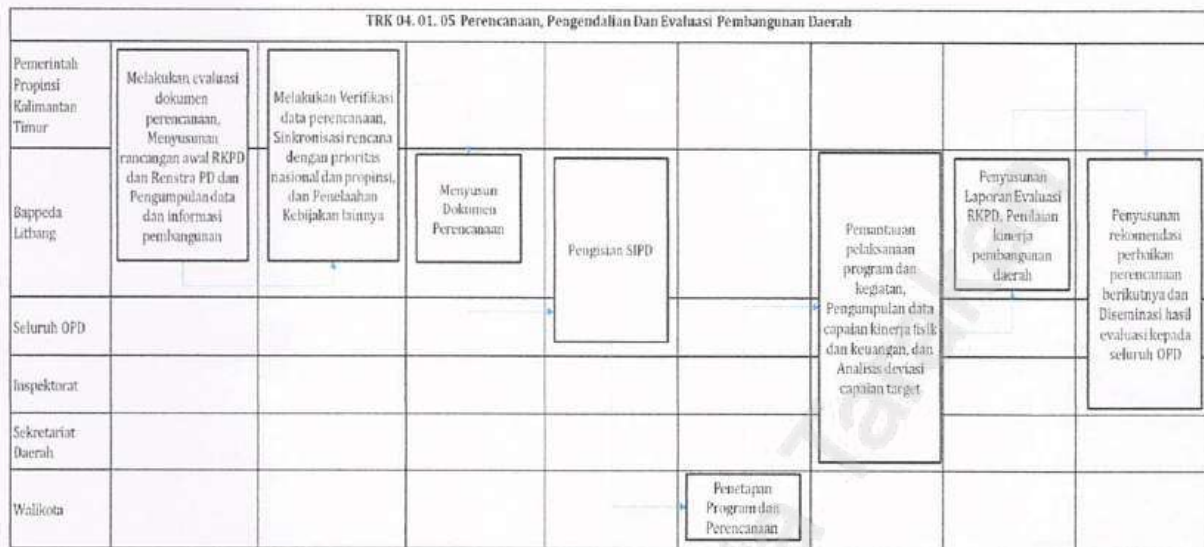
			Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah program yang realisasi capaiannya di atas 80% terhadap RKPD murni atau RKPD-Perubahan dan program yang realisasi capaiannya di atas 80% terhadap RPJMD atau RPJMD Perubahan	5.0103.2.01- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.0103.2.010003- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.0103.2.010007- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Pemerintahan				Capaian kinerja Pembangunan pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian	5.0103- PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA		Jumlah program yang realisasi capaiannya di atas 80% terhadap RKPD murni atau RKPD-Perubahan dan program yang realisasi capaiannya di atas 80% terhadap RPJMD atau RPJMD Perubahan	5.0103.2.02- Koordinasi Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.0103.2.02.0003- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.0103.2.02.0007- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
			Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah program yang realisasi capaiannya di atas 80% terhadap RKPD murni atau RKPD-Perubahan dan program yang realisasi capaiannya di atas 80% terhadap RPJMD atau RPJMD Perubahan	5.0103.2.03- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.0103.2.03.0003- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	Meningkatnya kualitas hasil inovasi				Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	
		Meningkatnya kualitas Kajian kelayakan			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	5.0502- PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

			Terlaksananya penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil kajian kelitbang yang dihasilkan sebagai bahan pengambilan kebijakan	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
			Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah inovasi daerah dengan nilai kematangan yang memadai	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
			Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah program inovasi daerah yang dilaksanakan minimal 60% dari perencanaan	5.05.03.2.01- Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.2.010006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
			Terlaksananya inovasi dan inovasi	Jumlah inovasi dengan nilai kematangan maksimal yang dapat dilaporkan untuk penilaian IGA	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator) (Laporan)	5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi
			Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
	Meningkatnya tata kelola Bappedalitbang			Nilai SAKIP	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	5.0101- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	5.0101.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01012.010008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01012.010009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	5.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01012.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Meningkatnya layanan kesekretariatan			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	5.0101-PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Tersedianya Layanan Administrasi kepegawaian		Persentase layanan administrasi kepegawaian yang tersedia	5.01012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01012.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01012.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01012.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01012.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.01012.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01012.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Tersedianya layanan administrasi umum		Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	5.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01012.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01012.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01012.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi		Persentase BMD yang terinput di e-BMD	5.01012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01012.07.0005 - Pengadaan Mebel
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya layanan jasa penunjang		Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	5.01012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01012.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah		Persentase BMD yang dipelihara	5.01012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01012.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01012.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01012.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PETA PROSES BISNIS BAPPEDA LITBANG
(Perwali Kota Tarakan nomor 100.3.3.3/HK- XI /756 /2025)



RENCANA AKSI TAHUN 2025 (e-SakipPRO)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Indikator	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator	Anggaran	Target							
											TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
											Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator	Anggaran	Indikator
	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian komponen perencanaan kinerja	%	74,5						1.604.623.340	401.155.835	0	401.155.835	0	401.155.835	0	401.155.835	0
		Capaian komponen pengukuran kinerja	%	60								0		0		0		0
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Capaian Kinerja Pembangunan daerah (persentase) (%)		97,45	927.016.600	231.754.150		231.754.150		231.754.150		231.754.150	
							Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)		100									
							Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)		100									
							Capaian Kinerja Pembangunan daerah (persentase) (%)		100									
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan disusun tepat waktu	%	3	706.174.900	176.543.725	0	176.543.725	0	176.543.725	3	176.543.725	0
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	531.291.600	132.822.900	1	132.822.900	1	132.822.900	0	132.822.900	0

					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	7	45.136.200	11.284.050	5	11.284.050	2	11.284.050	0	11.284.050	0
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	5	88.395.500	22.098.900	2	22.098.900	3	22.098.900	0	22.098.900	0
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)	Dokumen	3	41.351.500	10.337.875	0	10.337.875	1	10.337.875	2	10.337.875	0
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan	%	2	110.649.800	27.662.450	1	27.662.450	2	27.662.450	0	27.662.450	0
					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	110.649.800	27.662.450	1	27.662.450	0	27.662.450	0	27.662.450	0
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	laporan	3	110.191.900	27.547.975	2	27.547.975	1	27.547.975	0	27.547.975	0
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3	110.191.900	27.547.975	1	27.547.975	2	27.547.975	0	27.547.975	0
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja Pembangunan pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian (%)		99	677.606.740	169.401.685		169.401.685		169.401.685		169.401.685	

LKIP TAHUN 2025 97

					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	31	58.402.940	14.600.735	0	14.600.735	0	14.600.735	0	14.600.735	0
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	30	5.000.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	40	5.000.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	41.597.000	10.399.250	0	10.399.250	0	10.399.250	0	10.399.250	0
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	25	108.132.400	27.033.100	0	27.033.100	0	27.033.100	0	27.033.100	0

					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	24	10.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	32	6.806.800	1.701.700	0	1.701.700	0	1.701.700	0	1.701.700	0
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	150.167.600	37.541.900	1	37.541.900	1	37.541.900	1	37.541.900	1
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah program yang konsisten antara Renja dengan RKPD Murni, Perubahan Renja dengan RKPD Perubahan, dan Renstra dengan RPJMD/ Renstra Perubahan dengan RPJMD Perubahan sub bidang perekonomian	Program	6	169.000.000	42.250.000	0	42.250.000	0	42.250.000	0	42.250.000	0

[illegible]

					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	12	59.600.000	14.900.000	0	14.900.000	0	14.900.000	0	14.900.000	12
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	12	44.000.000	11.000.000	0	11.000.000	4	11.000.000	8	11.000.000	0
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	12	59.600.000	14.900.000	0	14.900.000	0	14.900.000	0	14.900.000	12
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah program yang konsisten antara Renja dengan RKPD Murni, Perubahan Renja dengan RKPD Perubahan, dan Renstra dengan RPJMD/ Renstra Perubahan dengan RPJMD Perubahan	Program	9	123.500.000	30.875.000	0	30.875.000	0	30.875.000	0	30.875.000	0
						Jumlah program yang realisasi capaiannya di atas 80% terhadap RKPD murni atau RKPD-Perubahan dan program yang realisasi capaiannya di atas 80% terhadap RPJMD atau RPJMD Perubahan	Program	0			0		0		0		0

					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9	62.000.000	15.500.000	0	15.500.000	3	15.500.000	9	15.500.000	0
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	9	61.500.000	15.375.000	0	15.375.000	0	15.375.000	0	15.375.000	9
Meningkatnya Kualitas hasil Inovasi	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	%	80						267.075.700	66.768.925	0	66.768.925	0	66.768.925	0	66.768.925	0
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)		0	267.075.700	66.768.925		66.768.925		66.768.925		66.768.925	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	jumlah hasil kajian kelitbangan yang dihasilkan sebagai bahan pengambilan kebijakan	hasil kajian	1	133.292.200	33.323.050	0	33.323.050	0	33.323.050	0	33.323.050	1
					Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	3	133.292.200	33.323.050	0	33.323.050	0	33.323.050	0	33.323.050	0

					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah dengan nilai kematangan yang memadai	Inovasi	1	133.783.500	33.445.875	0	33.445.875	0	33.445.875	0	33.445.875	1
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	9	104.462.000	26.115.500	0	26.115.500	0	26.115.500	0	26.115.500	0
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	29.321.500	7.330.375	0	7.330.375	0	7.330.375	0	7.330.375	0
Meningkatnya Tata Kelola Bappedalitbang	Nilai SAKIP	Nilai	80,74						6.033.563.869	1.508.390.974	0	1.508.390.965	0	1.508.390.965	0	1.508.390.965	0
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85								0		0		0		0
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (Indeks)		92	6.033.563.869	1.508.390.974		1.508.390.965		1.508.390.965		1.508.390.965	
						Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)		78									
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	1	9.000.000	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	2.000.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2.000.000	500.000	0	500.000	1	500.000	0	500.000	1
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	5.000.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	Dokumen	0	5.278.599.078	1.319.649.771	0	1.319.649.769	0	1.319.649.769	0	1.319.649.769	0
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	38	5.224.353.078	1.306.088.271	0	1.306.088.269	0	1.306.088.269	0	1.306.088.269	0
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	54.246.000	13.561.500	0	13.561.500	0	13.561.500	0	13.561.500	0
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang tersedia	%	0	11.900.000	2.975.000	0	2.975.000	0	2.975.000	0	2.975.000	0
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	11.900.000	2.975.000	0	2.975.000	0	2.975.000	0	2.975.000	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	%	1	195.439.060	48.859.768	0	48.859.764	0	48.859.764	0	48.859.764	0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.974.800	1.243.700	0	1.243.700	0	1.243.700	0	1.243.700	1
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	59.050.770	14.762.694	0	14.762.692	0	14.762.692	0	14.762.692	0

					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	9.229.390	2.307.349	0	2.307.347	0	2.307.347	0	2.307.347	0
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	22.158.900	5.539.725	0	5.539.725	1	5.539.725	0	5.539.725	1
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	100.025.200	25.006.300	0	25.006.300	0	25.006.300	0	25.006.300	0
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terinput dalam e-BMD	%	8	116.460.800	29.115.200	0	29.115.200	0	29.115.200	0	29.115.200	0
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	60.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	36.460.800	9.115.200	0	9.115.200	0	9.115.200	0	9.115.200	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	%	1	215.812.731	53.953.185	0	53.953.182	0	53.953.182	0	53.953.182	0
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.700.000	675.000	0	675.000	0	675.000	0	675.000	0
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.650.731	45.162.685	3	45.162.682	3	45.162.682	3	45.162.682	3

					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.462.000	615.500	0	615.500	0	615.500	0	615.500	0
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset/BMD yang dipelihara	Persen	0	206.352.200	51.588.050	0	51.588.050	0	51.588.050	0	51.588.050	0
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	77.160.000	19.290.000	0	19.290.000	0	19.290.000	0	19.290.000	0
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	60.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	29.000.000	7.250.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42	40.192.200	10.048.050	0	10.048.050	0	10.048.050	0	10.048.050	0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Per 31 DESEMBER 2025



PEMERINTAHAN KOTA TARAKAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	7,435,441,611.00	6,960,753,419.00	93.62	8,281,221,474.00
5.1	BELANJA OPERASI	6,894,000,311.00	6,469,917,485.00	93.85	6,645,709,974.00
5.1.01	Belanja Pegawai	5,097,024,187.00	4,909,806,565.00	96.33	5,149,415,129.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,796,976,124.00	1,560,110,920.00	86.82	1,496,294,845.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6,894,000,311.00	6,469,917,485.00	93.85	6,645,709,974.00
5.2	BELANJA MODAL	541,441,300.00	490,835,934.00	90.65	1,635,511,500.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116,460,800.00	115,869,700.00	99.49	247,511,500.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	424,980,500.00	374,966,234.00	88.23	1,388,000,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	541,441,300.00	490,835,934.00	90.65	1,635,511,500.00
	JUMLAH BELANJA	7,435,441,611.00	6,960,753,419.00	93.62	8,281,221,474.00
	SURPLUS/DEFISIT	(7,435,441,611.00)	(6,960,753,419.00)	93.62	(8,281,221,474.00)

Kota Tarakan, 31 Desember 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Dr. Gatiyo Hendratno, S.T.P., M.M.

NIP. 197301012005021003

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN TAHUN 2025

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DESEMBER

Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
1		3	4	5	6	7	8	
22	JUMLAH ANG/REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	7.435.441.611,00	100,00	99,37	93,62	6.960.753.419,00	474.688.192,00	DR. CATUR HENDRATMO, S. TP., M.M
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	5.944.389.101,00	100,00	99,60	95,26	5.662.875.393,00	281.513.708,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.640.000,00	100,00	78,01	68,59	5.240.000,00	2.400.000,00	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi	1.650.000,00	100,00		0,00	0,00	1.650.000,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.650.000,00	100,00	100,00	100,00	1.650.000,00	0,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.01.0008	Penyusunan Matriks Pendukung Statistik Sektorial Daerah	4.250.000,00	100,00	100,00	83,13	3.560.000,00	790.000,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.142.270.187,00	100,00	99,94	96,27	4.956.262.505,00	191.987.682,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Cas dan Tunjangan ASN	5.097.024.187,00	100,00	100,00	96,33	4.909.806.509,00	187.217.682,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	51.246.000,00	100,00	94,44	90,69	46.476.000,00	4.770.000,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.315.761,00	100,00	94,39	86,52	245.122.161,00	38.193.600,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Kebutuhan Material Laboratorium/Bangunan Kantor	4.974.500,00	100,00	100,00	57,44	4.349.834,00	624.666,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.050.770,00	100,00	96,69	77,99	46.054.414,00	12.996.356,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.303.541,00	100,00	100,00	96,63	8.023.907,00	279.634,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.06.0009	Pembelian Kebutuhan Lain	20.658.900,00	100,00	100,00	97,75	20.457.263,00	471.637,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.06.0009	Penyediaan Rapiat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.027.450,00	100,00	92,61	87,46	136.296.653,00	23.820.797,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.460.800,00	100,00	100,00	99,49	115.869.700,00	591.100,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	100,00	100,00	99,50	59.700.000,00	300.000,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	100,00	100,00	99,73	19.946.700,00	53.300,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	36.460.800,00	100,00	100,00	99,35	36.223.000,00	237.800,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.672.931,00	100,00	98,39	80,74	176.756.246,00	41.916.685,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Sertifikasi Menyurat	2.700.000,00	100,00	41,41	38,78	1.647.000,00	1.053.000,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.577.131,00	100,00	96,94	78,92	142.439.556,00	40.137.575,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kapasitas	30.000.000,00	100,00	100,00	100,00	30.000.000,00	0,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.395.800,00	100,00	100,00	94,74	2.269.690,00	126.110,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	171.029.422,00	100,00	100,00	96,24	164.604.781,00	6.424.641,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	40.106.000,00	100,00	100,00	97,95	39.169.900,00	946.100,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan	60.550.000,00	100,00	100,00	92,13	55.762.800,00	4.787.200,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan (Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000,00	100,00	100,00	95,26	26.500.000,00	500.000,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	41.373.422,00	100,00	100,00	99,49	41.106.081,00	215.341,00	IN SRI REJEKI, S. Pd
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	769.325.010,00	100,00	99,81	95,46	753.477.531,00	35.847.479,00	
5.01.02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	618.172.000,00	100,00	99,84	94,59	584.747.559,00	33.424.441,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEU (%)	REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PAP/PTK
1		2	3	4	5	6	7	8
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemetaan, dan Strategi Pembangunan Daerah	491.740.700,00	100,00	99,85	98,35	483.620.304,00	8.111.396,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	32.082.300,00	100,00	100,00	92,50	29.677.365,00	2.404.935,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.01.0005	Penyusunan Mekanisme Kabupaten Kota	65.377.300,00	100,00	99,63	67,12	43.582.266,00	21.795.034,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi, Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	20.871.700,00	100,00	100,00	95,12	27.556.964,00	1.412.736,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	77.209.410,00	100,00	99,43	99,05	76.478.596,00	730.814,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	77.209.410,00	100,00	99,43	99,05	76.478.596,00	730.814,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	93.943.600,00	100,00	99,89	98,20	92.250.736,00	1.692.864,00	
5.01.02.2.03.0002	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkaitan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	93.943.600,00	100,00	99,89	98,20	92.250.736,00	1.692.864,00	SALMA HASAN, S.T., M.T.
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	459.564.970,00	100,00	81,51	69,40	318.948.110,00	140.616.860,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	235.436.770,00	100,00	70,30	63,72	151.927.245,00	83.509.525,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP, RPJ, RPJMD dan RKPD)	31.731.070,00	100,00	88,05	85,04	28.564.250,00	3.166.820,00	ARBATI, S.K.M., M.H.
5.01.03.2.01.0002	Audit dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.250.000,00	100,00	9,18	5,18	380.000,00	3.869.000,00	ARBATI, S.K.M., M.H.
5.01.03.2.01.0003	Perakasa Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.250.000,00	100,00	98,82	98,82	4.200.000,00	50.000,00	ARBATI, S.K.M., M.H.
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	22.070.500,00	100,00	93,39	79,33	17.508.429,00	4.562.071,00	ARBATI, S.K.M., M.H.
5.01.03.2.01.0005	Penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP, RPJ, RPJMD dan RKPD)	58.308.800,00	100,00	99,47	98,19	48.931.227,00	9.377.573,00	ARBATI, S.K.M., M.H.
5.01.03.2.01.0006	Audit dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.500.000,00	100,00	43,93	28,24	2.400.000,00	3.100.000,00	ARBATI, S.K.M., M.H.
5.01.03.2.01.0007	Perakasa Monitoring dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.903.400,00	100,00	29,22	27,48	1.318.840,00	3.584.560,00	ARBATI, S.K.M., M.H.
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	106.523.000,00	100,00	60,10	47,50	50.594.489,00	55.928.511,00	ARBATI, S.K.M., M.H.
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	137.817.500,00	100,00	90,14	62,88	88.663.985,00	51.153.515,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP, RPJ, RPJMD dan RKPD)	40.538.420,00	100,00	98,86	8,58	3.476.265,00	37.062.155,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi, Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	39.954.480,00	100,00	84,88	84,86	33.595.360,00	6.359.120,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP, RPJ, RPJMD dan RKPD)	22.655.600,00	100,00	99,74	95,48	21.632.360,00	1.023.240,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi, Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	34.069.000,00	100,00	79,76	79,75	27.850.000,00	7.219.000,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	83.310.700,00	100,00	99,31	96,45	80.356.880,00	2.953.820,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP, RPJ, RPJMD dan RKPD)	18.410.700,00	100,00	98,50	82,00	13.456.880,00	2.953.820,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi, Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	66.900.000,00	100,00	100,00	100,00	66.900.000,00	0,00	ZAINUDDIN, S.T., M.T.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
1		3	(%)	FISIK (%)	KEU. (%)	6	7	8
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
5 05 02 2 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	242.162.530,00	100,00	95,51	93,10	225.452.385,00	16.710.145,00	
5 05 02 2 02 0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	121.897.400,00	100,00	91,93	89,97	109.666.602,00	12.230.798,00	
		121.897.400,00	100,00	91,93	89,97	109.666.602,00	12.230.798,00	
5 05 02 2 04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							SALMA HASAN, S.T.,M.T
5 05 02 2 04 0003	Dikembangkan jenis, prosedur, dan metode penyediaan layanan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	120.265.130,00	100,00	99,14	96,26	115.785.783,00	4.479.347,00	
		93.401.530,00	100,00	99,22	96,40	90.035.695,00	3.364.535,00	
5 05 02 2 04 0004	Seleksi dan diseminasi hasil-hasil penelitian	26.683.600,00	100,00	98,85	95,85	25.749.088,00	1.114.512,00	
								SALMA HASAN, S.T.,M.T



Tarakan 02 Januari 2026

Kepada Yth. Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan

Dr. SATUR HENDRATMO, S.T.P.,M.M
NIP. 19710112005021003

GRAFIK TARGET DAN REALISASI **FISIK** dan **KEUANGAN** TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

BULAN	TARGET	REALISASI
JAN	7,91	6,59
FEB	19,05	12,47
MAR	26,68	15,53
APR	39,17	34,60
MEI	54,13	40,23
JUN	60,92	50,72
JUL	67,28	59,39
AGUST	76,24	65,83
SEP	82,07	72,22
OKT	88,41	81,76
NOV	94,21	91,16
DES	100,00	98,37



BULAN	TARGET	REALISASI
JAN	7,22	2,23
FEB	15,22	4,54
MAR	25,20	10,76
APR	33,51	23,38
MEI	44,98	28,79
JUN	59,89	38,63
JUL	67,28	45,10
AGUST	73,10	51,15
SEP	82,07	61,73
OKT	88,41	69,23
NOV	94,21	76,99
DES	100,00	93,62





PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. (0551) 21072-21859, Tarakan 77121
Laman : <http://itwil.tarakankota.go.id> Pos-el : inspektorat@tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA INSPEKTORAT KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

Tarakan, 26 Februari 2026

Inspektur,

ABD. AZIS HASAN, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750212 199501 1 001

KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√	

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	

CATATAN HASIL REVIU

NO.	CATATAN PERBAIKAN
1.	Secara administratif, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan sudah baik, namun secara substansi perlu ditingkatkan pada aspek analisis evaluatif dan rekomendasi strategis agar laporan ini tidak sekadar menjadi dokumen penggugur kewajiban, melainkan alat kendali manajemen untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.